

... SERVICES  
- INVESTASI - IR - Perpustakaan Universitas Airlangga  
- EMPLOYEES - KEMERDEKAAN

# TESIS

## PENGARUH PELAYANAN PUBLIK TERHADAP PERKEMBANGAN INVESTASI ASING DAN PENYERAPAN TENAGA KERJA PADA INDUSTRI MANUFAKTUR DI KOTA BATAM

775  
100  
100/07  
Pud



**HORMAN PUDINAUNG**

**PROGRAM PASCASARJANA  
UNIVERSITAS AIRLANGGA  
SURABAYA  
2005**



# **T E S I S**

## **PENGARUH PELAYANAN PUBLIK TERHADAP PERKEMBANGAN INVESTASI ASING DAN PENYERAPAN TENAGA KERJA PADA INDUSTRI MANUFAKTUR DI KOTA BATAM**

**HORMAN PUDINAUNG**

**NIM : 090010129 L**

**PROGRAM PASCASARJANA  
UNIVERSITAS AIRLANGGA  
S U R A B A Y A  
2005**

**PENGARUH PELAYANAN PUBLIK TERHADAP PERKEMBANGAN  
INVESTASI ASING DAN PENYERAPAN TENAGA KERJA PADA  
INDUSTRI MANUFAKTUR DI KOTA BATAM**

**T E S I S**

**Untuk Memperoleh Gelar Magister  
Dalam Program Studi Ilmu Manajemen  
Pada Program Pascasarjana Universitas Airlangga**

**OLEH:**

**HORMAN PUDINAUNG**

**NIM : 090010129 L**

**PROGRAM PASCASARJANA  
UNIVERSITAS AIRLANGGA  
SURABAYA  
2005**

iii

## LEMBAR PENGESAHAN

MATERI PROPOSAL TESIS INI TELAH DISETUJUI

PADA TANGGAL ..... 2005

OLEH

PEMBIMBING



**PROF. DR. H.M.S. IDRUS, SE, M.Ec**  
**NIP . 130 704 318**

MENGETAHUI  
KETUA PROGRAM STUDI ILMU MANAJEMEN  
PROGRAM MAGISTER PROGRAM PASCASARJANA  
UNIVERSITAS AIRLANGGA



**DR. SRI GUNAWAN, M.COM**  
**NIP . 131 653 420**

PROGRAM PASCASARJANA  
UNIVERSITAS AIRLANGGA  
SURABAYA  
2005

**Telah diuji pada**

**Tanggal,**

**2005**

**PANITIA PENGUJI TESIS**

**Ketua : Prof. Dr. H. Suroso Imam Zadjuli, SE**  
**Anggota : 1. Prof. Dr.M.Idrus,SE.M.Ec**  
**2. Prof. V. Henky Supit, Drs. Ec., Ak**  
**3. Prof.Dr.H.Sarmanu.drh.MS**  
**4. Dr. Sri Gunawan,Drs,M.Com**

## UCAPAN TERIMA KASIH

Puji dan syukur saya panjatkan kepada Tuhan Yang Maha Esa karena atas rahmatnya saya dapat menyelesaikan tesis yang berjudul **Pengaruh Pelayanan Publik terhadap Perkembangan Investasi Asing dan Penyerapan Tenaga Kerja pada Industri Manufaktur di Kota Batam.**

Tesis yang telah saya hasilkan ini sesungguhnya tidak terlepas dari bimbingan dan pengarahan yang diberikan kepada saya, untuk itu pada kesempatan ini saya mengucapkan terima kasih yang sebesar-besarnya kepada :

1. **Bapak Prof Dr. H. MS. Idrus, SE.,M.EC** selaku pembimbing yang senantiasa dengan sabar memberikan bimbingan, dorongan dan motivasi selama penulisan tesis ini.
2. **Bapak Drs. Sri Gunawan, M.Com DBA** selaku Ketua Program Studi Ilmu Manajemen Program Pasca Sarjana Universitas Airlangga yang telah membantu kelancaran tesis ini
3. **Bapak Prof Dr. H. Soroso Imam Zadjuli, SE** selaku kordinator program Pascasarjana Unjversitas Airlangga kelas Batam yang telah banyak membantu kelancaran perkuliahan serta memberikan masukan – masukan yang konstruktif didalam penyelesaian tesis ini.
4. **Bapak Prof Dr. Muhamad Amin, dr** selaku Direktur Program Pascasarjana Universitas Airlangga yang telah memberikan kesempatan kepada saya untuk meneruskan penyelesaian studi ini.

5. **Bapak Prof. Dr. H Sarmanu MS** yang telah banyak memberikan bimbingan dan arahan kepada saya dalam bidang statistik dan metodologi penelitian.
6. **Bapak Ir. Mohammad Priyanto ME** selaku Deputy Administrasi dan Perencanaan Otorita Batam yang telah memberikan kesempatan dan waktu untuk penyelesaian tesis ini
7. **Istriku Christiana Setyowati, dr** dan kedua anak saya **Hana Andrea** dan **Samuel Irving** yang dengan penuh kesabaran terus mendorong saya serta terus memberikan pengertian didalam saya menyelesaikan tesis ini.
8. **Saudara Alfet Buchari ST** dan **sdri. Isfarini Nasution SP** serta para anggota surveyor yang telah dapat membantu saya untuk menyebar kuesioner penelitian
9. Bapak-bapak, Ibu-ibu dosen Program Pascasarjana Universitas Airlangga yang telah banyak memberikan ilmu pengetahuan kepada saya selama mengikuti pendidikan Pasca Sarjana.
10. Rekan-rekan mahasiswa Program studi Ilmu Manajemen Angkatan-I Universitas Airlangga kelas Batam yang telah memberikan dorongan kepada saya didalam menyelesaikan studi ini.
11. Kepada semua pihak yang tidak dapat saya sebutkan satu persatu yang telah membantu memberikan semangat maupun dorongan moril sehingga studi ini dapat saya selesaikan dengan baik

Kiranya semua yang diberikan dari Bapak, Ibu, saudara, saudari dapat diberkati oleh Tuhan Yang Maha Esa.

Saya menyadari bahwa masih banyak kekurangan dan ketidaksempurnaan didalam penulisan tesis ini, untuk itu saya berharap dapat memperoleh kritik dan saran demi memperbaiki tesis ini dan sebagai nya semoga tesis ini dapat memberikan manfaat bagi pihak-pihak yang membutuhkannya.

Batam, 20 April 2005

Horman Pudinaung

## RINGKASAN

**PENGARUH PELAYANAN PUBLIK TERHADAP PERKEMBANGAN  
INVESTASI ASING DAN PENYERAPAN TENAGA KERJA PADA  
INDUSTRI MANUFAKTUR DI KOTA BATAM.**

Sektor industri merupakan tulang punggung pertumbuhan Ekonomi Pulau Batam karena dari pertumbuhan PDRB Batam pada tahun 2003 sebesar 7,73 % sektor industri menempati urutan pertama dimana dapat memberikan kontribusi sebesar 70,73 %. Dengan pertumbuhan yang baik ini maka sektor ini juga dapat memberikan kontribusi bagi penyerapan tenaga kerja sebanyak 143.775 orang atau 76,5 % dari jumlah tenaga kerja sebesar 187.842 orang. Berdasarkan kondisi seperti ini maka momentum pertumbuhan di Batam harus tetap dijaga sehingga dapat menciptakan iklim usaha yang kondusif yang dapat memberikan daya tarik bagi investor untuk menanamkan modalnya di Pulau ini.

Studi ini bertujuan untuk mengetahui seberapa besar pengaruh Pelayanan Publik terhadap Perkembangan Investasi Asing dan pengaruh Pelayanan Publik terhadap Penyerapan Tenaga Kerja serta Pengaruh Perkembangan Investasi Asing terhadap penyerapan Tenaga Kerja khususnya pada industri manufaktur di Kota Batam.

Variabel yang digunakan didalam pelayanan publik terdiri dari beberapa variabel indikator yaitu *Keamanan, Kemudahan memperoleh Tenaga Kerja, Perlakuan kepada investor, Infrastruktur fisik, kemudahan lakukan usaha, lingkungan sosial domestik, kualitas sumber daya alam* sedangkan untuk variabel Perkembangan Investasi Asing yaitu Jumlah Investasi dan Jumlah Perusahaan sedangkan variabel dependent adalah Penyerapan Tenaga Kerja.

Data yang digunakan dalam penelitian ini adalah data primer yang kemudian dianalisis dengan menggunakan Structural Equation Model (SEM). Hasil Uji Validitas untuk tujuh indikator variable dari Pelayanan Publik hanya lima indikator yaitu *Keamanan, Kemudahan memperoleh Tenaga Kerja, Infrastruktur fisik, kemudahan lakukan usaha, kualitas sumber daya alam* yang valid atau sahih dan kemudian dari lima indikator tersebut dilaksanakan uji realibilitas dan hasilnya kelima indikator ternyata realible

Hasil Penelitian menunjukkan bahwa Pengaruh Pelayanan Publik terhadap perkembangan Investasi Asing dengan nilai koefisien jalur -0,49 dan Pengaruh Perkembangan Investasi terhadap Penyerapan Tenaga Kerja dengan nilai koefisien jalur 0,46 dan Pelayanan Publik terhadap penyerapan Tenaga Kerja dengan nilai koefisien jalur 0,51 hasilnya *signifikan*

Dengan demikian berdasarkan hasil penelitian ini maka untuk tetap menjaga agar Batam dapat memberikan kontribusi didalam perkembangan investasi asing dan penyerapan tenaga kerja maka pelayanan publik perlu ditingkatkan secara berkelanjutan dan disederhanakan sehingga dapat menciptakan iklim usaha yang kondusif.

## SUMMARY

### THE INFLUENCE OF PUBLIC SERVICE ON FOREIGN INVESTMENT AND LABOR RECRUITMENT IN MANUFACTURE INDUSTRIES IN BATAM

Industrial sectors are one of the most important key on the economics growth development in Batam Island because from the information taken in 2003 about 7.73% from the industrial sectors contributed about 70.73 growth of PDRB Batam. With this amount of growth, these sectors can employ around 143,775 labors; statistic stated about 75.5% from 187,842 labors who actively looking for the job. Based on this condition, the path of economics growth that is very reliant on the industry sectors has managed many foreign investors to allocate their money on this island.

This study is formulated to recognize how much public services can influence foreign investment growth and labors recruitment. Also, how foreign investment growth can influence labors recruitment on the manufacture industries in Batam.

Variables that are used on public services focused on seven indicators: Security, Labors, Physical infrastructure, Social domestic environment, Simple procedure on labor recruitment, Simple procedure on doing business, Quality of resources. Variables that are used on foreign investment growth focused on the number of investment and the number of corporation. Among these variables there is one dependent variable which is labors recruiting.

Those data are combined with prime data and compiled using Structural Equation Model (SEM). The result from seven indicator variables on public service only five of them are valid and reliable. Five of them are: Security, Simple procedure on labor recruitment, Physical infrastructure, Simple procedure on doing business, Quality of resources.

The result shows the influence of public service toward foreign investment growth has  $-0,49$  coefficient, meanwhile the influence on foreign investment toward labor recruitment has  $0,46$  coefficient, and last but not least the influence on public service toward labor recruitment has  $0,51$  coefficient. The result is significant.

Based on this research, public services have to be put on the first priority if Batam wants to attract many foreign investors to allocate their money here and also to simplify the regulations regarding labor law to create a good business environment.

## **ABSTRACT**

# **THE INFLUENCE OF PUBLIC SERVICES ON FOREIGN INVESTMENT AND MANPOWER RECRUITMENT IN THE MANUFACTURING INDUSTRIES IN BATAM**

The industrial sector is the backbone of Batam Island's economic growth. The Product Domestic Regional Bruto ( PDRB ) figure of 2003 shows a 7,73 % increase and the industry sector ranks first by contributing 70,73 % to this growth. This significant development was also able to attract and absorb 143.775 workers, which is 75,5 % from the total 187.842 wokers on the island. In order to keep this momentum going, it is imperative to create a favourable and condusive business climate and environment to attract more entrepreneurs to invest on Batam Island.

The purpose of this research is to know how public services affect foreign investments and attract workers to find employment on the island particularly in manufacturing industry. It also serve as an feedback to the Batam Administration in planning and managing Batam's future by providing better public services / facilities to investors.

In this research primary data is analyzed by using the Structural Equational Model (SEM). Analysis results show that the impact of public services on foreign investment is quite significant as well as the fact that workers are attracted to be employed in the manufacturing Industry in Batam.

**Key Word : Public Services Improvement never end**

**DAFTAR ISI**

	halaman
Sampul Depan.....	i
Sampul Dalam.....	ii
Prasyarat Gelar.....	iii
Persetujuan .....	iv
Penetapan Panitia.....	v
Ucapan Terima Kasih.....	vi
Ringkasan .....	vii
Summary.....	viii
Abstract.....	ix
Daftar Isi .....	x
Daftar Tabel .....	xiii
Daftar Gambar .....	xiv
<b>Bab 1 PENDAHULUAN</b>	
1.1 Latar Belakang .....	1
1.2 Perumusan Masalah .....	8
1.3 Tujuan Penelitian .....	9
1.4 Manfaat Penelitian .....	10
<b>Bab 2 TINJAUAN PUSTAKA</b>	
2.1 Konsepsi Pelayanan Publik .....	11
2.2 Konsepsi Kebijakan Publik .....	15
2.3 Konsepsi Pengembangan Investasi .....	21
2.4 Konsepsi Pemilihan Lokasi Investasi .....	27
2.5 Konsepsi Tenaga Kerja .....	29

<b>Bab 3</b>	<b>KERANGKA KONSEPTUAL DAN HIPOTESIS</b>	
3.1	Kerangka Proses Berfikir .....	33
3.2	Kerangka Konseptual.....	34
3.3	Hipotesis .....	35
<b>Bab 4</b>	<b>METODE PENELITIAN</b>	
4.1	Jenis dan Rancangan Penelitian .....	36
4.2	Populasi dan Penentuan Sampel .....	36
4.3	Variabel Penelitian .....	37
4.4	Bahan dan Alat Penelitian .....	39
4.5	Instrumen Penelitian .....	39
4.6	Lokasi dan Waktu Penelitian .....	40
4.7	Prosedur Pengambilan dan Pengumpulan Data .....	40
4.8	Cara Pengolahan dan Analisis Data .....	42
<b>Bab 5</b>	<b>GAMBARAN UMUM WILAYAH PENELITIAN</b>	
5.1	Sejarah Pengembangan Batam .....	43
5.2	Keadaan Prasarana dan Sarana .....	45
5.3	Perkembangan Kependudukan dan Ketenagakerjaan .....	47
5.4	Perkembangan Ekonomi .....	50
4.1	Perkembangan Investasi .....	54
<b>Bab 6</b>	<b>HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN</b>	
6.1	Gambaran Responden Penelitian.....	56
6.2	Analisis Struktural Equation Model atas Variabel-variabel Pelayanan Publik.....	57

**Bab 7 PENUTUP**

7.1 Kesimpulan..... 61

7.2 Saran ..... 62

**DAFTAR PUSTAKA ..... 63**

**LAMPIRAN**

**DAFTAR TABEL**

	halaman
Tabel 1.1 Tingkat Pertumbuhan Ekonomi Batam Tahun 1996-2004 .....	5
Tabel 2.1 Variabel Daya Tarik Investasi .....	27
Tabel 4.1 Definisi Operasional .....	38
Tabel 5.1 Perkembangan Jumlah Penduduk Kota Batam tahun 1999 - 2003I .....	48
Tabel 5.2 Perkembangan Jumlah Tenaga Kerja menurut sector Ekonomi Tahun 1999 - 2003 .....	49
Tabel 5.3 Distribusi Persentase PDRB Kota Batam menurut lapangan usaha .....	52
Tabel 5.4 Perkembangan Ekspor Kota Batam tahun 1999 - 2003 .....	53
Tabel 5.5 Perkembangan Investasi Asing PMA di Kota Batam tahun 1999 - 2003 .....	55
Tabel 6.1 Uji Validitas Pelayanan Publik .....	57
Tabel 6.2 Uji Reliabilitas Pelayanan Publik .....	58
Tabel 6.3 Pengaruh Pelayanan Publik terhadap Perkembangan Investasi Asing dan Penyerapan Tenaga Kerja	59

## DAFTAR GAMBAR

	halaman
Gambar 2.1 Tahap-tahap Perumusan Masalah .....	17
Gambar 2.2 Kekuatan Persaingan Dalam Industri .....	25
Gambar 3.1 Kerangka Proses Berfikir .....	31
Gambar 3.2 Kerangka Konseptual .....	32
Gambar 6.1 Hasil Pengolahan Model Struktural Equational Pengaruh Pelayanan Publik terhadap perkembangan Investasi Asing dan Penyerapan Tenaga Kerja .....	60

## DAFTAR LAMPIRAN

	halaman
Lampiran 1.1 Hasil Structural Equation Model .....	
Lampiran 2.1 Rekapitulasi Data Quisioner Variabel Hasil Penelitian .....	
Lampiran 3.1 Quisioner Penelitian .....	

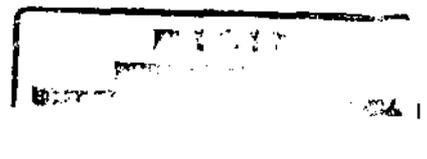
# **BAB 1**

## **PENDAHULUAN**

### **1.1 Latar Belakang Masalah**

Pulau Batam secara geografis terletak pada 1° 07' Lintang Utara (North latitude) and 104°07' Bujur Timur (East longitude) di jalur perdagangan yang padat yang merupakan jalur pelayaran internasional paling ramai kedua di dunia setelah Selat Dover di Inggris, yang berjarak 12,5 mil laut ( $\pm$  20 km) dari Singapura. Pulau dengan luas 415 km<sup>2</sup> ini telah terkenal sejak ratusan tahun yang lalu pada masa kerajaan Malaya, dimana pada tahun 1511-1528 Laksamana Hang Nadim menggunakan Pulau Batam untuk berperang melawan Portugis. Dan untuk mengenangnya nama Hang Nadim kemudian diabadikan sebagai nama Bandara Internasional Batam. Selain itu selama penjajahan Belanda pada abad 17 dan 18, pulau Batam juga memainkan peran penting sebagai markas pasukan laut kerajaan Malaya untuk memerangi penjajah Belanda.

Pada awalnya dibangun oleh pemerintah di tahun 1970-an, penduduk Batam diperkirakan berkisar antara enam ribu orang, dengan mata pencaharian sebagian besar sebagai nelayan sedangkan kegiatan ekonomi lainnya yang cukup signifikan seperti industri, perdagangan dan pariwisata belum ada sehingga kontribusi Pulau Batam terhadap pembangunan lokal dan nasional dalam bentuk setoran pajak relatif belum ada.



Pada saat itu, upaya pengembangan Pulau Batam lebih ditekankan pada pendekatan keamanan (*security approach*) yang merupakan landasan pemikiran bagi upaya mengembangkan wilayah perbatasan dimana terdapat banyaknya pulau-pulau kosong tak berpenghuni yang sangat rawan dari segi keamanan.

Menyadari bahwa pendekatan keamanan saja tidak akan mendapatkan hasil yang optimal karena membutuhkan biaya yang sangat besar maka perlu ditunjang oleh pendekatan lain yaitu pendekatan kesejahteraan (*prosperity approach*) yang juga menjadi dasar pertimbangan pemerintah dengan mengamati dan berpandangan jauh kedepan bahwa, posisi strategis di sepanjang selat Singapura selama ini hanya dimanfaatkan oleh Singapura saja.

Pendekatan ini diambil dengan tujuan agar Pulau Batam dapat berkembang dengan dipicu oleh pembangunan infrastruktur yang dapat berperan sebagai "*self propelling growth*" dikemudian hari yang pada gilirannya dapat membiayai sendiri upaya pengembangannya sehingga tujuan untuk "mengisi" wilayah perbatasan dapat terpenuhi. Pertimbangan-pertimbangan ini kemudian dituangkan dalam Keputusan Presiden No. 65 tahun 1970, kemudian diikuti dengan keputusan Presiden No 74 tahun 1971 tentang Pengembangan Pembangunan Pulau Batam.

Kedua keputusan ini merupakan titik tolak pembangunan Pulau Batam, walaupun luas area pengembangan hanya meliputi bagian utara Batu Ampar saja dan pendanaan biaya pembangunan hanya diperoleh dari Pertamina, sehingga kelengkapan sarana dan prasarana juga hanya disediakan bagi melengkapi suatu kebutuhan sebuah "base camp".

Sejalan dengan perkembangan dan pertumbuhannya yang terus meningkat maka pemerintah memandang perlu menetapkan seluruh Pulau Batam menjadi Daerah Industri, dan untuk pengelolaannya dibentuklah Otorita Pengembangan Daerah Industri Pulau Batam dengan Keputusan Presiden Republik Indonesia No. 41 tahun 1973, sebagai badan pemerintah yang bertanggung jawab atas pengembangan Pulau Batam dengan tugas-tugas yang meliputi :

1. Mengembangkan dan mengendalikan pembangunan Pulau Batam sebagai suatu Daerah Industri dan kegiatan-kegiatan pengalih-kapalan (*transshipment*) .
2. Merencanakan kebutuhan prasarana dan pengusaha instalasi-instalasi prasarana dan fasilitas lainnya;
3. Menampung dan meneliti permohonan izin usaha yang diajukan oleh para pengusaha serta mengajukannya kepada instansi-instansi yang bersangkutan;

4. Menjamin agar tata cara perizinan dan pemberian jasa-jasa yang diperlukan dalam mendirikan dan menjalankan usaha-usaha di Pulau Batam dapat berjalan lancar dan tertib.

Dalam rangka mengakomodasi pesatnya pertumbuhan kegiatan di Pulau Batam, yang menuntut perluasan wilayah usaha, maka diterbitkan Keppres No 28 tahun 1992 wilayah kerja Otorita Batam, dengan penambahan Pulau Rempang, Galang, Galang Baru, dan pulau-pulau kecil disekitarnya sehingga luas keseluruhan dari wilayah kerja Otorita Batam menjadi 715 Km<sup>2</sup>.

Dengan dikeluarkan UU nomor 22 tahun 1999 tentang Pemerintahan Daerah dan penetapan Batam sebagai kota Otonom melalui UU nomor 53 tahun 1999 maka beberapa kewenangan dan pelaksanaan pembangunan di Batam diatur bersama antara Otorita Batam dan Pemerintah Kota Batam sebagaimana yang diamanatkan didalam pasal 21 ayat (1) UU nomor 53 tahun 1999.

Dengan demikian terlihat ada keunikan Pulau Batam dari daerah lain didalam pengembangan Pulau Batam meskipun ada dua instansi pemerintah di Batam, namun masing-masing telah jelas pembagian kewenangannya, yaitu Otorita Batam tetap meneruskan pengelolaan di bidang industri, alih kapal, pariwisata dan perdagangan, sedangkan Pemko Batam mempunyai kewenangan di bidang pemerintahan.

Dari kebijakan yang diterapkan oleh pemerintah ini dapat dilihat bahwa pemerintah sangat memperhatikan pengembangan investasi yang telah ditanam di Pulau Batam baik yang berasal dari Pemerintah maupun Swasta. Data yang dikumpul dari tahun 1996 sampai dengan tahun 2003, tingkat pertumbuhan ekonomi di Batam mengalami pertumbuhan yang cukup menarik. Tabel 1.1 dibawah ini ;

**TABEL 1.1. TINGKAT PERTUMBUHAN EKONOMI BATAM  
TAHUN 1996-2003**

Tahun	Tingkat Pertumbuhan Ekonomi ( % )
1996	16,85
1997	14,76
1998	3,08
1999	6,38
2000	7,72
2001	7,90
2002	8,35
2003	7,73

*Sumber : Batam Development Progress 2003 (Otorita Batam)*

Pesatnya pertumbuhan ekonomi Batam ini tidak terlepas dari tingginya minat investasi di Batam baik dari luar maupun dalam negeri. Sampai dengan Desember 2003 jumlah investasi di Batam telah mencapai US\$ 10.280 juta yang terdiri dari investasi swasta US \$ 8.090 juta ( 78,7 % ) dan investasi pemerintah sebesar US \$ 2.190 juta ( 21,30 % ) sehingga ratio antara investasi swasta dan pemerintah yaitu 1 : 3,7 dengan kata lain bahwa satu dollar investasi pemerintah dapat membangkitkan 3, 7 kali investasi swasta. Sedangkan dari jumlah investasi swasta sebesar US \$ 8.090 juta, investasi asing memberi kontribusi sebesar US \$ 3.630 juta.

Jumlah investasi dalam bidang industri ini tersebar didalam 14 Kawasan Industri yaitu SWP Tanjung Uncang terdapat 1 Kawasan Industri, SWP Batu Ampar terdapat 5 Kawasan Industri, SWP Muka Kuning terdapat 2 Kawasan Industri, SWP Kabil terdapat 2 Kawasan Industri, SWP Batam Centre terdapat 4 Kawasan Industri dengan jumlah lahan seluas 840 Ha.

Investasi asing di Batam mempunyai perbedaan fundamental dibandingkan dengan investasi asing di daerah Indonesia lainnya yang sebagian besar cenderung bersifat substitusi import dengan hasil produk baik barang jadi maupun barang setengah jadi yang kemudian dirakit di pabrik asalnya sedangkan industri di Batam bersifat export oriented.

Dengan adanya perusahaan PMA di Batam ini dapat mendorong tumbuhnya pengusaha-pengusaha lokal (UKM), sehingga jumlah UKM yang pada tahun 1993 hanya sekitar 3.855, dan hingga tahun 2003 telah mencapai 9.886 perusahaan.

Selain itu investasi asing, bersama-sama dengan investor lokal di Batam juga telah memberikan kontribusi ekspor cukup signifikan terhadap total ekspor non migas Indonesia, yaitu sekitar  $\pm 16\%$  setiap tahunnya, atau sebesar US\$ 3,9 milyar pada tahun 2003, dan yang memberikan kontribusi terbesar adalah bidang industri sebesar 69,62 %.

Mengingat Pulau Batam yang merupakan daerah yang relatif kurang subur dan tidak mempunyai sumber daya alam sehingga sangat bertumpu pada investor asing dan lokal maka peran pemerintah untuk menjaga momentum ini sangat penting sehingga dapat mendorong kemajuan bagi masyarakat Indonesia secara umum dan masyarakat Batam khususnya. Berdasarkan hal ini maka penulis mencoba melakukan penelitian ini sehingga hasilnya dapat digunakan oleh Otorita Batam dan Pemerintah Kota Batam dalam menyusun strategi pemasaran kawasan industri Batam dalam rangka meningkatkan kepercayaan konsumen (investor asing).

Dalam penelitian ini bidang industri yang dipilih adalah industri manufaktur. Alasan dipilihnya industri manufaktur adalah karena industri yang ada di Batam mayoritas bergerak dalam bidang industri manufaktur. Sedangkan kawasan industri yang dipilih adalah kawasan industri **Batamindo, Kabil Indonusa, Batam Centre, Citra Buana dan Batu Ampar**, kawasan industri ini dipilih oleh peneliti karena kawasan ini merupakan kawasan industri yang baik kondisi industri manufakturnya dan sebagian besar kepemilikan perusahaan berasal dari penanaman modal asing (PMA).

## **1.2 Perumusan Masalah**

Dengan daya tarik Batam yang berada di posisi yang strategis, karena berbatasan langsung dengan Singapura dan Malaysia dan merupakan jalur pelayaran Internasional dan ditunjang pula oleh adanya kerjasama tiga negara yang dikenal dengan SIJORI (Singapura, Johor dan Riau) atau IMS-GT (Indonesia Malaysia Singapore Growth Triangle), maka penulis akan melakukan penelitian terhadap pengaruh pelayanan publik terhadap pengembangan investasi asing dan penyerapan tenaga kerja pada industri manufaktu di Batam, Untuk itu permasalahan yang perlu didalami :

1. Apakah faktor Pelayanan Publik berpengaruh terhadap investasi asing bidang industri manufaktur di Batam ?
2. Apakah faktor Pelayanan Publik berpengaruh terhadap penyerapan tenaga kerja di Batam ?

3. Apakah faktor Pelayanan Publik berpengaruh terhadap pengembangan investasi asing bidang industri manufaktur dan penyerapan tenaga kerja di Batam ?

### **1.3 Tujuan Studi**

#### **1.3.1 Tujuan Umum**

Secara umum studi ini bertujuan untuk menganalisis sejauhmana keterkaitan antara Pelayanan publik yang dibuat dengan investasi modal asing dan penyerapan tenaga kerja pada industri manufaktur di Batam.

#### **1.3.2 Tujuan Khusus**

Sebagaimana yang telah diuraikan sebelumnya dalam perumusan masalah di atas maka tujuan khusus yang hendak dicapai didalam penelitian ini adalah:

1. Menganalisis pengaruh Pelayanan Publik terhadap perkembangan investasi asing di Batam
2. Menganalisis pengaruh Pelayanan Publik terhadap penyerapan tenaga kerja di Batam
3. Menganalisis pengaruh Pelayanan Publik terhadap perkembangan investasi asing dan penyerapan tenaga kerja pada industri manufaktur di Batam

#### 1.4 Manfaat Penelitian

Hasil dari studi diharapkan memberikan manfaat dan kegunaan sebagai berikut :

1. Bagi Pemerintah di daerah dan Badan Otorita Batam sebagai masukan untuk dapat dijadikan dasar Kebijakan dalam pengembangan kawasan ini supaya dapat menarik investor serta untuk mengambil langkah-langkah kebijakan dalam mengantisipasi dampak negatif yang terjadi.
2. Bagi Perguruan Tinggi, hendaknya dapat dijadikan salah satu bahan kajian ilmiah untuk pengembangan kawasan seperti ini di wilayah Indonesia lainya khusus didalam pengelolaan investasi asing dalam bidang industri manufaktur.
3. Bagi Masyarakat Batam pada khususnya dan Indonesia pada umumnya sebagai salah satu masukan dalam memahami pentingnya dukungan masyarakat kepada pemerintah dalam menciptakan iklim investasi yang kondusif.

## **BAB 2**

### **TINJAUAN PUSTAKA**

Untuk mengetahui dasar-dasar pemikiran dari penelitian ini dan bahan acuan serta perbandingan dalam penelitian ini, maka dapat ditinjau dari beberapa pustaka yang memiliki relevansi dengan penelitian ini.

#### **2.1 Konsep Pelayanan Publik**

##### **2.1.1 Pengertian Umum**

Pelayanan Publik adalah segala kegiatan pelayanan sebagai upaya pemenuhan kebutuhan penerima pelayanan maupun pelaksanaan ketentuan peraturan perundang-undangan yang dilaksanakan oleh Instansi Pemerintah meliputi satuan kerja/satuan organisasi Kementerian, Departemen, Lembaga Pemerintah Non Departemen, Kesekretariatan Lembaga Tertinggi dan Tinggi Negara, dan Instansi Pemerintah lainnya, baik Pusat maupun Daerah termasuk Badan Usaha Milik Negara, Badan Hukum Milik Negara dan Badan Usaha Milik Daerah dimana unit kerja tersebut secara langsung memberikan pelayanan kepada penerima pelayanan publik (*Kepmen 63/KEP/M.PAN/7/2003*).

### **2.1.2 Asas Pelayanan Publik**

Pada hakekatnya Pelayanan Publik adalah pemberian pelayanan prima kepada masyarakat yang merupakan perwujudan kewajiban aparatur pemerintah sebagai abdi masyarakat. Untuk itu harus memenuhi beberapa asas yaitu :

1. *Transparansi*
2. *Akuntabilitas*
3. *Kondisional*
4. *Partisipatif*
5. *Kesamaan Hak*
6. *Keseimbangan Hak dan Kewajiban*

Dalam penyelenggaraan pelayanan publik (khususnya bidang infrastruktur), peran pemerintah sangat vital dalam menjamin berlangsungnya suatu pelayanan yang efektif dan efisien serta dapat dipertanggungjawabkan. Berbagai usaha telah dilakukan untuk meningkatkan kualitas dan kuantitas dari pelayanan publik tersebut, namun perlu juga dipahami kondisi internal dari fungsi pelayanan publik yang selama ini dilaksanakan, sehingga kebijakan yang dibuat dapat realistis dan tidak melepaskan tanggung jawab pemerintah sebagai pemegang kendali pelayanan publik.



Kebijakan untuk memperbaiki pelayanan publik agar diarahkan untuk membentuk suatu iklim usaha yang dapat meminimalkan resiko berusaha, untuk itu harus berpedoman pada beberapa prinsip Pelayanan Publik, diantaranya :

1. Kesederhanaan
2. Kejelasan
3. Rincian biaya pelayanan publik dan tata cara pembayaran.
4. Kepastian Waktu
5. Akurasi
6. Keamanan
7. Tanggung jawab
8. Kelengkapan sarana dan prasarana
9. Kemudahan Akses
10. Kedisiplinan
11. Kenyamanan

### **2.1.3 Standar Pelayanan Publik**

Setiap penyelenggaraan pelayanan publik harus memiliki standar pelayanan dan dipublikasikan sebagai jaminan adanya kepastian bagi penerima pelayanan. Standar pelayanan merupakan ukuran yang dibakukan dalam penyelenggaraan pelayanan publik yang wajib ditaati oleh pemberi dan atau penerima pelayanan.

Standar pelayanan sekurang-kurangnya meliputi :

1. Prosedur pelayanan yang dibakukan bagi pemberi dan penerima pelayanan termasuk pengaduan.
2. Waktu penyelesaian yang ditetapkan sejak saat pengajuan permohonan sampai dengan penyelesaian pelayanan termasuk pengaduan.
3. Biaya/tarif pelayanan termasuk rinciannya yang ditetapkan dalam proses pemberian pelayanan.
4. Produk /Hasil pelayanan yang akan diterima sesuai dengan ketentuan yang telah ditetapkan.
5. Penyediaan sarana dan prasarana pelayanan yang memadai oleh penyelenggara pelayanan publik
6. Kompetensi petugas pemberi pelayanan harus ditetapkan dengan tepat berdasarkan pengetahuan, keahlian, keterampilan, sikap, dan perilaku yang dibutuhkan.
7. Hak dan kewajiban pihak pemberi dan penerima pelayanan publik
8. Pengukuran tingkat kepuasan masyarakat
9. Pengawasan Penyelenggaraan
10. Evaluasi Kinerja Penyelenggaraan Pelayanan

Keterbatasan dana pemerintah menjadi hambatan utama untuk meningkatkan fungsi pelayanan publik. Sebagai salah satu upaya mengatasi kendala tersebut, Pemerintah mencurahkan upaya melibatkan sektor swasta kedalam jasa pelayanan publik tersebut.

Namun demikian usaha yang sedang dilakukan perlu memahami kondisi internal dari fungsi pelayanan publik yang selama ini dilaksanakan, sehingga kebijakan yang dibuat dapat realistis dan tidak melepaskan tanggung jawab pemerintah sebagai pemegang kendali pelayanan publik. Kebijakan untuk memperbaiki pelayanan publik perlu membentuk suatu iklim usaha yang dapat meminimalkan resiko berusaha. Dari sekian banyak resiko yang timbul dalam suatu usaha dibidang pelayanan publik, terdapat dua resiko utama yang akan menjadi patokan awal, yaitu: resiko politis dan resiko pengaturan. Resiko politis timbul bilamana tidak ada kejelasan fungsi/peran dari pemerintah, sementara resiko pengaturan timbul karena adanya penyalahgunaan fungsi/peran dari pengaturan itu sendiri.

## **2.2 Konsepsi Kebijakan Publik**

Menurut Mustopadidjaja, AR (2001), kebijakan publik merupakan suatu keputusan yang dimaksudkan untuk mengatasi permasalahan tertentu, untuk melakukan kegiatan tertentu, atau untuk mencapai tujuan tertentu,

yang dilakukan oleh Instansi yang berkewenangan dalam rangka penyelenggaraan pemerintahan negara dan pembangunan. Kebijakan publik dalam rangka penyelenggaraan negara merupakan suatu stratifikasi kebijakan yang dari sudut manajemen dapat dibagi atas tiga kelompok, yaitu (a) Kebijakan umum (stratejik), (b) Kebijakan manajerial, dan (c) kebijakan teknis-operasional yang berkaitan satu sama lain.

Dari sudut manajerial, proses kebijakan dapat dipandang sebagai rangkaian kegiatan yang meliputi paling tidak 3 (tiga) kelompok yaitu : (1) Pembuatan Kebijakan, (2) Pengendalian Pelaksanaan Kebijakan, dan (3) Evaluasi Kinerja Kebijakan. Semua itu berlangsung dalam suatu lingkungan sosial politik dan kelembagaan dengan unsur-unsur yang kompleks. Oleh karena itu proses analisis kebijakan adalah serangkaian aktivitas intelektual yang dilakukan dalam proses kegiatan yang pada dasarnya bersifat politis.

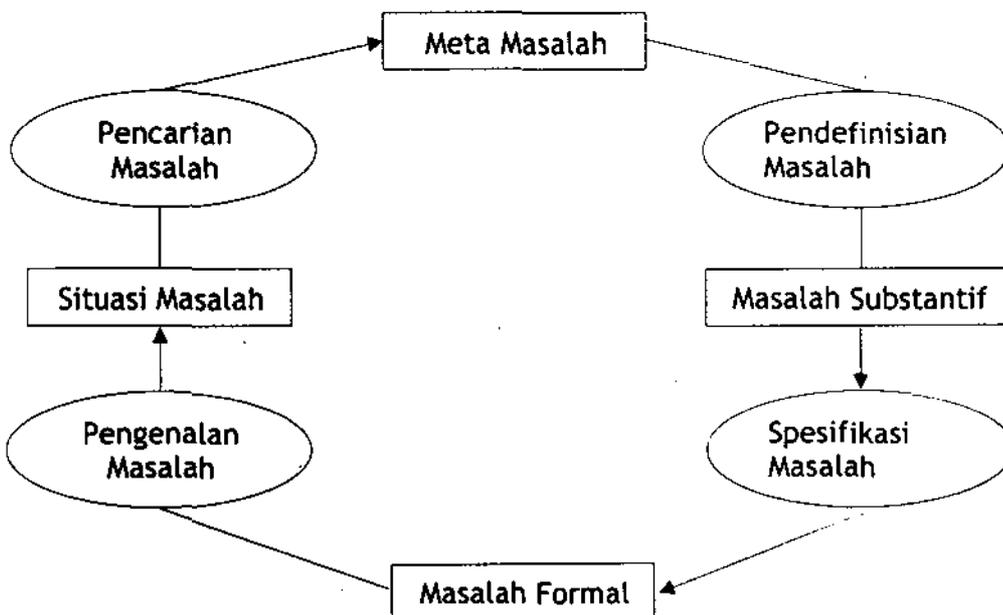
Menurut William N. Dunn, aktivitas politik tersebut diartikan sebagai proses pembuatan kebijakan yang divisualisasikan sebagai rangkaian tahap kegiatan yang saling terkait menurut urutan waktu, yaitu dimulai dari penyusunan agenda kebijakan, formulasi kebijakan, adopsi kebijakan, implementasi kebijakan, dan penilaian kebijakan. Analisis kebijakan menghasilkan informasi yang relevan dengan kebijakan pada satu, beberapa atau seluruh tahap dari proses pembuatan kebijakan.

Oleh karena itu kebijakan dilakukan untuk menciptakan penilaian yang dilakukan secara kritis dengan mengkomunikasikan pengetahuan yang relevan dengan kebijakan dalam satu atau lebih proses pembuatan kebijakan.

Mustopadidjaja mengusulkan 7 (tujuh) tahap atau langkah-langkah yang perlu dilakukan sejak dari perumusan masalah sampai perumusan rekomendasi kebijakan. Langkah-langkah tersebut antara lain :

### 2.2.1 Pengkajian Masalah

Kegiatan ini bertujuan menemukan dan memahami hakekat persoalan dari suatu permasalahan dan kemudian merumuskannya dalam hubungan sebab akibat. Tiga bekal pokok yang perlu dimiliki dalam pengkajian persoalan ini adalah teori, metodologi perumusan masalah dan informasi. William Dunn mengusulkan tahap-tahap perumusan masalah sebagaimana terlihat pada diagram berikut ini :



GAMBAR 2.1 . TAHAP-TAHAP PERUMUSAN MASALAH

Perumusan masalah dimulai dari pengenalan masalah dengan tujuan mengidentifikasi situasi masalah yang menggambarkan keadaan seputar masalah. Tahap selanjutnya adalah pencarian masalah yang bertujuan mencari beberapa gambaran masalah dari pelaku kebijakan atau stakeholders. Pada tahap ini analisis dihadapkan pada meta masalah yaitu

masalah-masalah rumit karena wilayah gambaran masalah-masalah yang dimiliki pelaku kebijakan tidak tertata rapi. Meta masalah merupakan masalah urutan kedua yang dapat didefinisikan sebagai kelas dari semua masalah urutan pertama ini biasanya masalah yang dilihat dari kepentingan masing-masing stakeholders (sosial, politik, ekonomi, hukum, budaya dan sebagainya). Kedua tingkat masalah ini harus dibedakan secara jelas, agar terhindar dari resiko memformulasikan masalah yang salah dengan mencampur anggota dan kelasnya.

Setelah identifikasi meta masalah, selanjutnya dilakukan pendefinisian masalah dengan tujuan untuk menemukan masalah substantif. Masalah substantif adalah masalah yang didefinisikan dalam istilah yang paling mendasar misalnya apakah masalah itu merupakan masalah ekonomi, sosial atau masalah politik. Jika masalah substantif didefinisikan sebagai masalah ekonomi, maka faktor-faktor yang berhubungan dengan masalah tersebut berada diseperti aspek produksi dan distribusi barang dan jasa.

Transformasi masalah substantif ke masalah formasi dilakukan melalui spesifikasi masalah, yang secara tipikal meliputi pengembangan model matematis formal dari masalah substantif.

### **1. Penentuan Tujuan**

Tujuan adalah akibat yang secara sadar ingin dicapai atau ingin dihindari secara umum suatu kebijakan selalu bertujuan untuk mencapai kebaikan-kebaikan yang lebih banyak dan lebih baik atau mencegah terjadinya keburukan atau kerugian. Tujuan harus dirumuskan secara jelas, realistis dan terukur

### **2. Perumusan Alternatif**

Beberapa alternatif dapat dikembangkan untuk mencapai tujuan yang telah ditetapkan. Pengembangan alternatif dilakukan berdasarkan :

- a. Pengamatan terhadap kebijakan yang ada (sedang dilaksanakan) dan kemudian diperbaiki secara bertahap (*incremental*).
- b. Melakukan semacam analogi dari suatu kebijakan dalam suatu bidang dan coba menerapkannya dalam bidang yang sedang dipelajari (*branching*).
- c. Merupakan hasil pengkajian dari persoalan tertentu (*inventive*).

### **3. Penyusunan Model**

Model adalah penyederhanaan dari kenyataan persoalan yang dihadapi, diwujudkan dalam hubungan-hubungan kausal atau fungsional. Model dapat dituangkan dalam berbagai bentuk yang dapat digolongkan sebagai berikut : skematik model (seperti flow chart dan diagram) model fisik seperti miniatur, game model (seperti adengan latihan manajemen, peperangan dan sebagainya). Model akan bermanfaat dalam melakukan prediksi akibat-akibat yang timbul dari ada atau tiadanya perubahan-perubahan dalam faktor penyebab.

Dengan demikian model merupakan alat bantu yang baik dalam perumusan dan penentuan solusi atau dalam perumusan tujuan dan pengembangan serta penentuan pilihan alternatif kebijakan.

#### **4. Penentuan Kriteria**

Analisis kebijakan memerlukan kriteria yang jelas dan konsisten untuk menilai alternatif-alternatif. Ini menyangkut bukan saja hal-hal yang bersifat pragmatis seperti ekonomi (efisien, dan sebagainya) politik (konsensus antar stakeholders dan sebagainya) Administratif (efektifitas dan sebagainya), tetapi juga hal-hal yang menyangkut nilai-nilai abstrak yang fundamental seperti etika dan filsafat (pemerataan, persamaan dan sebagainya)

#### **5. Penilaian Alternatif**

Alternatif-alternatif yang dikembangkan selanjutnya dinilai berdasarkan kriteria yang disepakati. Tujuan penilaian alternatif adalah untuk mendapatkan gambaran lebih jauh tentang efektivitas, efisiensi dan kelayakan masing-masing alternatif dalam pencapaian tujuan, sehingga diperoleh kesimpulan mengenai alternatif mana yang paling efektif dan paling efisien atau paling layak .

#### **6. Perumusan Rekomendasi**

Penilaian atas alternatif-alternatif akan memberi gambaran tentang sejumlah pilihan-pilihan yang tepat untuk mencapai tujuan tertentu. Langkah akhir dari analisis kebijakan adalah merumuskan sasaran mengenai alternatif yang diperhitungkan dapat mencapai tujuan secara optimal pada kondisi berbagai faktor lingkungan, administrasi dan ekonomi tertentu. Dalam rekomendasi sebaiknya dikemukakan pula strategi pelaksanaan dari alternatif yang disarankan atau direkomendasi.

### 2.3 Konsep Pengembangan Investasi

Berkaitan dengan persepsi dunia usaha tentang daya tarik investasi suatu negara atau daerah, penanaman modal baik dalam bentuk penanaman modal dalam negeri ataupun modal asing membutuhkan adanya iklim usaha yang sehat, dan kemudahan serta kejelasan prosedur penanaman modal.

Yang dimaksud dengan Penanaman Modal Asing (PMA) hanyalah meliputi penanaman modal asing secara langsung yang dilakukan berdasarkan ketentuan Undang-Undang No.1 Tahun 1967 dan digunakan menjalankan perusahaan di Indonesia, dalam arti pemilik modal secara langsung menanggung resiko dari penanaman modal tersebut (Widjaya,2000)

Sedangkan pengertian modal asing disini adalah alat pembayaran luar negeri yang tidak merupakan bagian dari kekayaan devisa Indonesia, yang dengan persetujuan Pemerintah digunakan untuk membiayai perusahaan di Indonesia (Widjaya,2000)

Dengan demikian dapat dikatakan bahwa modal asing merupakan modal yang berasal dari luar negeri yang telah disetujui oleh pemerintah Indonesia untuk melakukan usaha di Indonesia.

Ketertarikan investor PMA untuk memilih sebuah lokasi usaha di sebuah negara sangat dipengaruhi oleh beberapa hal.

1. Menurut Hill (2000:658) dalam *Political Risk and Economic Risk* menyatakan bahwa dalam menganalisa peluang investasi asing perusahaan harus cenderung memperhatikan resiko politik dan ekonomi.
2. Sedangkan Menurut M.E Porter dalam *Hunger*, J.David (2001:122) berpendapat bahwa perusahaan lebih memperhatikan pada persaingan yang ada dalam industrinya. Model kekuatan persaingan ditunjukkan pada gambar 2.1 menentukan tingkat intensitas. "Kekuatan kolektif dari kekuatan tersebut menentukan potensial laba pokok dalam industri, dimana potensial laba diukur dengan tingkat pengembalian "Investasi modal". Dalam melakukan pengamatan industri, perusahaan harus menilai pentingnya enam kekuatan untuk sukses, yaitu ancaman pendatang baru, persaingan diantara perusahaan yang telah ada, ancaman produk pengganti, bargaining power (kekuatan penawaran) pemasok, kekuatan penawaran pembeli dan kekuatan relatif dari stakeholder yang lain.
3. Menurut World Bank Group, *The Doing Business Indicators*, menyebutkan bahwa diperlukan waktu lebih lama serta tingkat kesulitan, ketidakpastian dan biaya lebih tinggi untuk berinvestasi di Indonesia dibandingkan dengan di negara tetangga., selain dari faktor yang dibawah ini

- a. Kondisi sosial, Ekonomi dan Politik
- b. Iklim Usaha
- c. adanya perlindungan hukum yang dapat memberikan keamanan bagi investor
- d. Ketentuan Perpajakan (Regulasi dan Kemudahan)
- e. Peraturan, kejelasan aturan main.
- f. Infrastruktur, meliputi transportasi, telekomunikasi
- g. Otonomi Daerah
- h. Tersedia banyak tenaga kerja yang terlatih.
- i. Hambatan non tarif (tata niaga dan diskriminasi)

Dalam *Microeconomic Policy* (p: 76-77) dikatakan bahwa kebijakan dibidang industri membutuhkan acuan yang bertindak atas nama pemerintah yang bertujuan bagi pertumbuhan dan perubahan, baik lewat pergeseran produktifitas secara general maupun aktivitas sepanjang jajaran atau via realokasi.

Pendekatan alami kebijakan industri dalam pengertian sebuah stimulasi melintas jajaran membawa instrumen seperti standarisasi, provisi informasi terhadap investasi di bidang sains, teknologi, kemasyarakatan dan infrastruktur fisik serta membuat institusi keuangan dan sistim hukum.

Target pendekatan terhadap kebijakan industrial didalam kebimbangan pengaruh realokasi produksi sepanjang kegiatan terbagi 4 kebijakan wilayah:

1. Eksploitasi positif terhadap skala ekonomi dan atau cakupan ekonomi
2. Strategi perdagangan dan kebijakan investasi dalam kaitannya dengan industri
3. Restrukturisasi ekonomi dalam merespon industri dan pengembangan wilayah
4. Keberanian dalam mengelompokkan usaha dengan jaringan teknologi, industri dan firma.

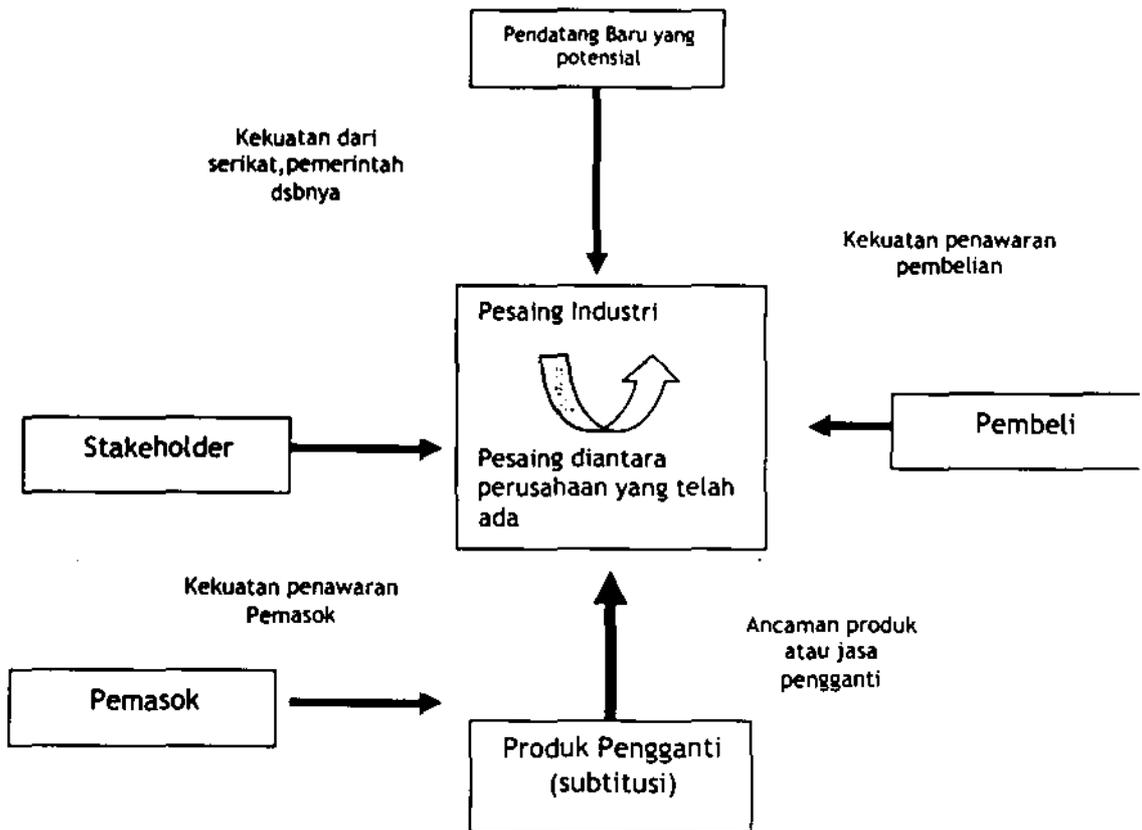
Dalam Hill, Charles W.L (p:209) menyatakan :

To Continue to attract foreign investment, The Chinese government has committed itself to invest more than \$800 billion in infrastructure projects over the next 10 years, which should improve the nation's poor highway system.

The Greater capital investment in an economy, the more favorable its future growth prospect are likely to be. Viewed this way, Foreign Direct Investment can be seen as an important capital investment and determinant of the future growth rate of an economy.

Menurut Porter (1994:4-5), penentu dasar pertama dari kemampuan suatu perusahaan adalah daya tarik industri. Strategi bersaing harus berkembang dari pengertian yang canggih akan aturan persaingan yang menentukan daya tarik suatu industri.

Ada lima kekuatan bersaing dalam industri apapun yaitu, masuknya pesaing baru, ancaman dari produk pengganti (substitusi), kekuatan penawaran (tawar-menawar) pemberli, kekuatan penawaran pemasok dan persaingan diantara pesaing-pesaing yang ada. (Gambar 2.1)



GAMBAR 2.2 KEKUATAN PERSAINGAN DALAM INDUSTRI

Teori Portfolio Markowitz dalam Rodoni Ahmad (2002:3) mengatakan jika risiko dianggap sebagai suatu masalah yang tidak disukai investor, maka pemilihan portfolio yang hanya berdasarkan sekuritas yang dinilai rendah ialah suatu metode pemilihan portfolio yang kurang baik.

Markowitz mendefinisikan portfolio sekuritas yang efisien sebagai portfolio yang memberikan tingkat keuntungan diharapkan maksimum untuk suatu tahap varians dan memberikan varians yang minimum suatu tahap tingkat keuntungan yang diharapkan. Teori portfolio juga membuat saran bahwa sebuah perusahaan perlu menilai proyek sebagaimana para investor menilai sekuritas.

Secara umum investasi akan masuk ke suatu daerah tergantung dari daya tarik daerah tersebut terhadap investasi, dan adanya iklim investasi yang kondusif. Keberhasilan daerah untuk meningkatkan daya tarik investasi dan dunia usaha serta peningkatan kualitas pelayanan terhadap masyarakat.

Kemampuan daerah untuk menentukan faktor-faktor yang dapat digunakan sebagai ukuran daya saing perekonomian daerah terhadap daerah lainnya juga sangat penting dalam upaya meningkatkan daya tarik berinvestasi.

Dalam penelitian ini sejumlah variabel konsep yang mempunyai variasi atau intensitas yang menggambarkan atribut dari variabel tersebut digunakan untuk menentukan daya tarik investasi. Variabel-variabel tersebut berdasarkan Penelitian dari PERC(2002) dan

Komite Pemantauan Pelaksanaan Otonomi Daerah (KPPOD,2003).

**TABEL 2.1 VARIABEL DAYA TARIK INVESTASI**

No	PERC (Batam)	KKPOD
1	Variabel Eksternal Resiko Politik	Policy Variable: Kelembagaan dan Sosial Politik
2	Variabel Investor Asing	
3	Prasarana Fisik	
4	Kemudahan Melakukan Usaha	
5	Lingkungan Sosial Politik	Endowment Variable: Ekonomi, infrastruktur dan ketenagakerjaan
6	Kualitas Kehidupan WNA	
7	Lingkungan Politik	
8	Lingkungan Sumber Daya Alam	
9	Lingkungan Pendidikan dan Variabel SDM	
10	Kualitas Institusional, Akuntabilitas dan Standarisasi	

Berdasarkan tabel perbandingan di atas serta beberapa teori yang telah disampaikan di atas, terlihat bahwa terdapat hal-hal yang mempengaruhi pengambilan keputusan investor dalam memilih lokasi investasi yang tepat, yaitu : Variabel Kelembagaan, Sosial Politik, Ekonomi, Infrastruktur, Kualitas Kehidupan WNA, dan Investor Asing.

## 2.4 Konsepsi Pemilihan Lokasi Investasi

Dalam masa pertumbuhan perusahaan-perusahaan terus membangun berbagai fasilitas produksi yang baru dan memperluas fasilitas yang telah ada. Kegiatan pembangunan dan perluasan melibatkan investasi yang besar.

Investasi diperlukan untuk konstruksi bangunan, pengadaan mesin dan peralatan. Agar investasi dapat lebih efisien, maka lokasi fasilitas produksi perlu ditentukan dengan tepat. Penentuan lokasi yang tepat akan meminimumkan beban investasi dan biaya operasional serta daya saing perusahaan.

Alasan utama perusahaan memilih lokasi yang berbeda karena berdasarkan kebutuhan mereka yang berbeda-beda. Lokasi yang baik merupakan suatu persoalan individual. Untuk membuat keputusan ini pendekatan yang digunakan adalah pendekatan konstitusional (*Contingency Approach*). Ketertarikan investor PMA untuk memilih sebuah lokasi usaha di sebuah negara sangat dipengaruhi oleh beberapa hal dalam Ansori Muslich, p:103 dikatakan bahwa ada beberapa faktor-faktor umum yang perlu dipertimbangkan dalam pemilihan lokasi, antara lain:

#### 1. *Lingkungan dan Ekologi*

Perusahaan perlu memperhatikan lingkungan dan ekologi di tempat fasilitas didirikan.

#### 2. *Kedekatan dengan Pasar*

Lokasi yang dekat dengan pasar akan membuat perusahaan dapat memberi pelayanan yang lebih baik kepada para pelanggan serta dapat mengurangi biaya distribusi.

#### 3. *Kedekatan dengan Bahan Mentah dan Pemasok*

Kedekatan dengan bahan mentah serta pemasok ini akan banyak bergantung pada jenis bahan mentah itu sendiri.

#### 4. *Fasilitas dan Biaya Pengangkutan*

Biaya pengangkutan merupakan salah satu faktor penentu lokasi untuk pabrik yang menghasilkan produk-produk besar dan berat.

#### 5. *Sumber Daya Alam Lainnya*

Tersedianya sumber alam lainya perlu diperhatikan dalam menentukan lokasi suatu pabrik. Kebutuhan akan air, sumber listrik, angin dan lainnya juga perlu dipertimbangkan.

#### 6. *Harga Tanah*

Harga tanah menjadi suatu pertimbangan penting terutama pabrik-pabrik yang mendekati pasar.

#### 7. *Kedekatan dengan Pabrik dan Gudang Lain*

Faktor ini perlu dipertimbangkan juga mengingat hal ini akan mempengaruhi besar kecilnya biaya distribusi. Demikian juga mengenai lokasi pabrik dan gudang pesaing ini juga ada pengaruhnya terutama dalam persaingan kecepatan menyediakan barang di pasaran.

### **2.5 Konsepsi Tenaga Kerja**

Tenaga kerja adalah orang yang mampu melakukan pekerjaan baik di dalam maupun di luar hubungan kerja guna menghasilkan jasa atau barang untuk memenuhi kebutuhan masyarakat. Tenaga kerja sering diklasifikasikan sebagai komponen produksi selain tanah, modal dan kewirausahaan,

sedangkan pada awalnya ada kecenderungan tenaga kerja dianggap suatu faktor produksi lainnya yang memberikan kontribusi relatif tetap terhadap produksi sehingga pandangan ini menghasilkan sistem pengupahan tetap terhadap tenaga kerja.

Pandangan ekonomi kapitalis terhadap tenaga kerja tidak terlepas dari faktor produksi atau input sehingga semakin berkembangnya iklim usaha menuntut adanya penyesuaian perlakuan terhadap tenaga kerja.

Sedangkan berdasarkan Pancasila dan UUD 1945 ketenagakerjaan merupakan sebagai bagian integral dari pembangunan Nasional dalam rangka pembangunan masyarakat Indonesia seluruhnya, pelaksanaan pembangunan Nasional tenaga kerja mempunyai peranan dan kedudukan yang sangat penting sebagai pelaku dan sasaran pembangunan

Dalam era globalisasi yang dikenal dengan liberalisasi ekonomi khususnya dalam bidang tenaga kerja, tenaga kerja Indonesia harus mampu bersaing dengan tenaga kerja asing karenanya dituntut keunggulan kompetitif bukan keunggulan komperatif karena sumber daya manusia memiliki sifat tidak terbatas (*infinite*)

Didalm arahan GBHN 1999-2004 di bidang ekonomi, yang berkaitan dengan ketenagakerjaan, khususnya peningkatan kualitas tenaga kerja antara lain :

1. Mengembangkan kebijakan industri, perdagangan dan investasi dalam rangka meningkatkan daya saing global dengan membuka aksesibilitas yang sama terhadap kesempatan kerja dan berusaha bagi segenap rakyat dan seluruh daerah.
2. Mengembangkan ketenagakerjaan secara menyeluruh dan terpadu yang diarahkan dalam peningkatan kompetensi dan kemandirian tenaga kerja, peningkatan pengupahan, penjaminan kesejahteraan, perlindungan kerja dan kebebasan berserikat.
3. Melakukan berbagai upaya terpadu untuk mempercepat proses pengentasan masyarakat dari kemiskinan dan mengurangi pengangguran yang merupakan dampak krisis ekonomi.

Sehubungan dengan arahan kebijakan GBHN tersebut, maka pembangunan ketenagakerjaan bertujuan untuk menyediakan lapangan kerja dan usaha bagi setiap angkatan kerja sehingga dapat memperoleh pekerjaan dan penghidupan yang layak sesuai dengan UUD 1945 Pasal 27 ayat (2).

### **2.5.1 Perencanaan Tenaga Kerja**

Perencanaan tenaga kerja diharapkan mengacu pada pengembangan kualitas dan kompetensi tenaga kerja sehingga dapat dihasilkan signal kondisi ketenagakerjaan yang baik, menyangkut penyediaan tenaga kerja, kebutuhan dan berbagai upaya yang harus

dilaksanakan termasuk kebijakan, strategi maupun program ketenagakerjaan dalam rangka pendayagunaan tenaga kerja secara produktif dan remuneratif.

Sesuai dengan Undang-Undang No.13 tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan, Bab IV pasal 7 mengamanatkan bahwa pemerintah telah menetapkan dan menyusun perencanaan tenaga kerja meliputi :

#### **1. Perencanaan tenaga kerja makro**

Proses penyusunan rencana ketenagakerjaan secara sistematis yang memuat pendayagunaan tenaga kerja secara optimal dan produktif guna mendukung pertumbuhan ekonomi dan sosial baik secara nasional, daerah maupun sektoral sehingga dapat membuka kesempatan kerja seluas-luasnya, meningkatkan produktivitas dan kesejahteraan pekerja.

#### **2. Perencanaan tenaga kerja mikro**

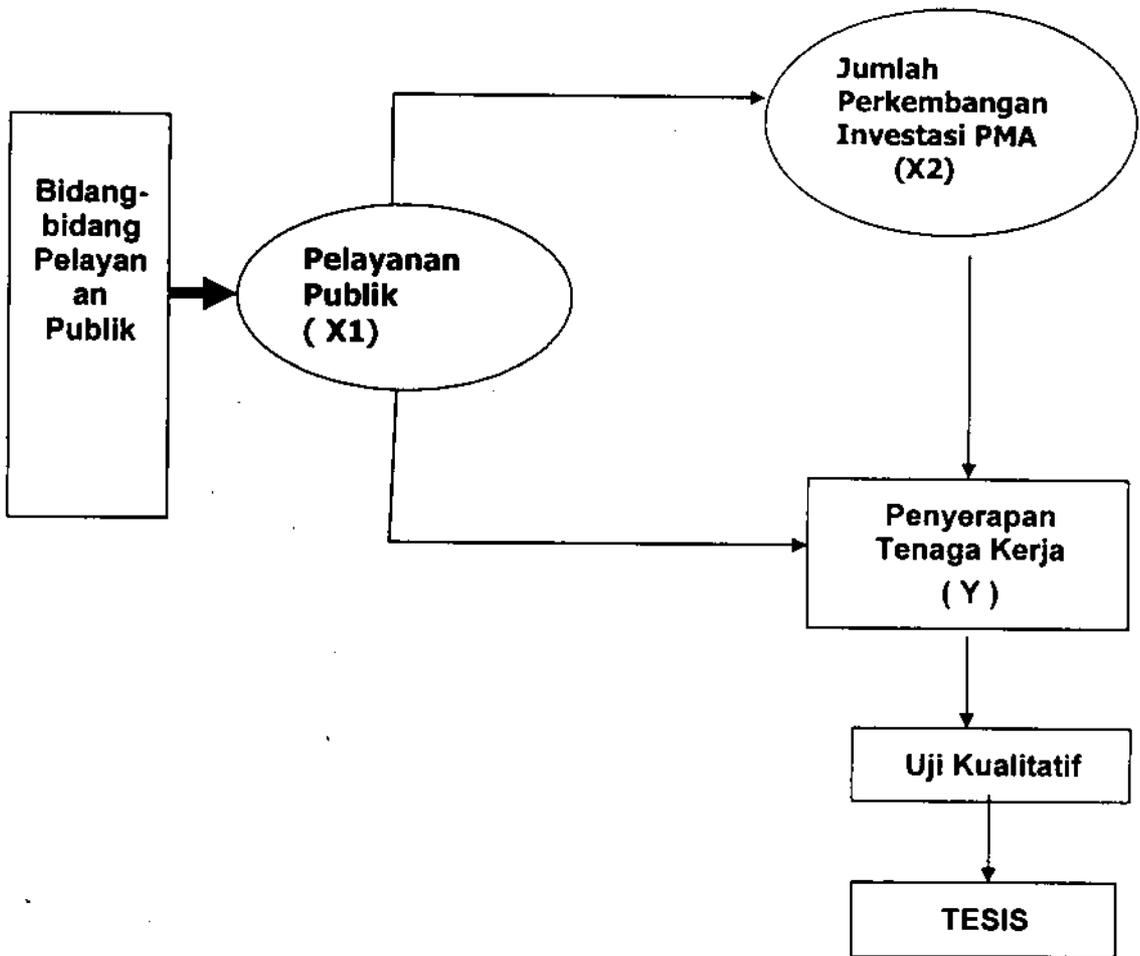
Proses penyusunan rencana ketenagakerjaan secara sistematis dalam suatu instansi baik pemerintah maupun swasta dalam rangka meningkatkan pendayagunaan tenaga kerja secara optimal dan produktif untuk mendukung pencapaian kinerja yang ada pada instansi atau perusahaan yang bersangkutan.

### BAB 3

## KERANGKA KONSEPTUAL DAN HIPOTESIS PENELITIAN

Pada Bab III ini akan dijelaskan mengenai kerangka konseptual penelitian, hipotesis, serta teknik analisis yang digunakan

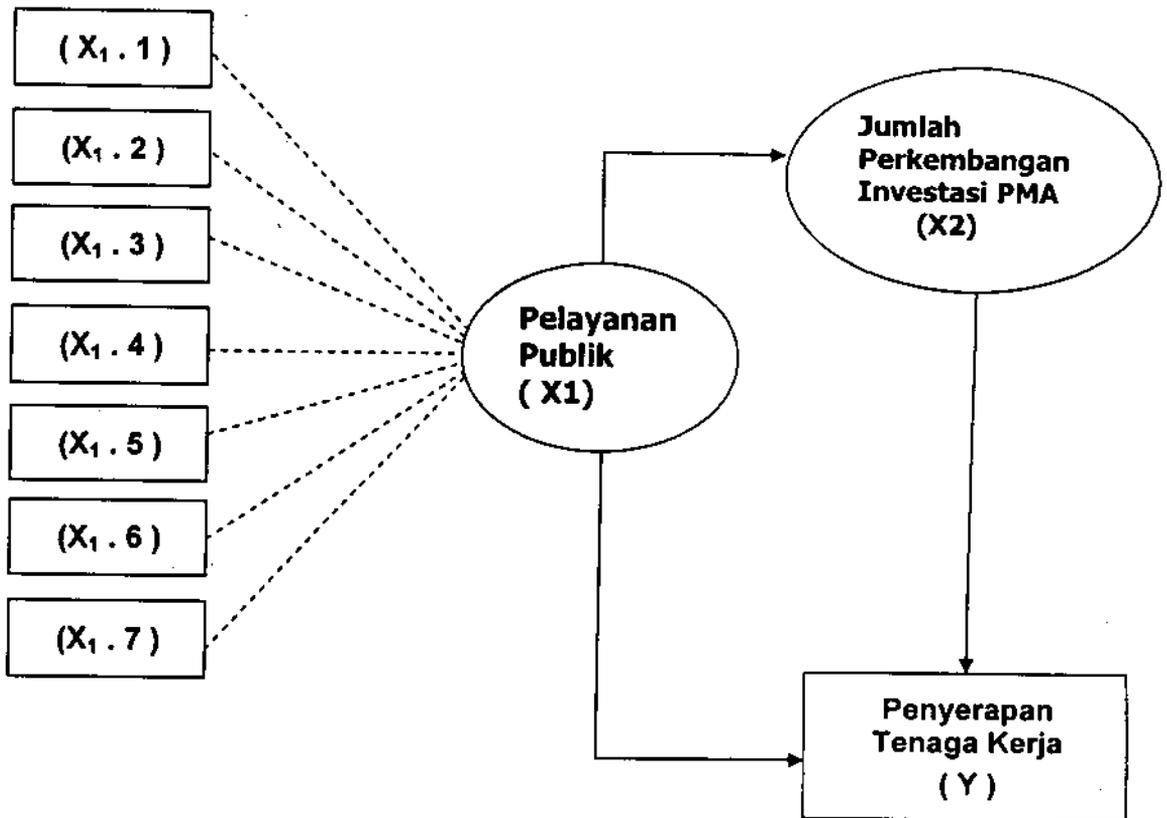
### 1.1 Kerangka Proses Berpikir



Gambar 3.1. Kerangka Proses Berpikir

## 1.2 Kerangka Konseptual

Perilaku para investor sangat dipengaruhi beberapa faktor dari dalam yang meliputi faktor keamanan, ketersediaan infrastruktur, ketersediaan tenaga kerja, upah tenaga kerja, Kelembagaan, Politik internal



**Gambar 3.2. Kerangka Konseptual**

### KETERANGAN

- |                                       |                                       |
|---------------------------------------|---------------------------------------|
| X1.1 Bidang keamanan                  | X 1.6 Bid. Lingkungan sosial Domestik |
| X1.2 Bidang upah tenaga kerja         |                                       |
| X1.3 Bidang perlakuan kepada investor | X 1.7 Bid. Kualitas Sumber daya Alam  |
| X1.4 Bidang infrastruktur fisik       |                                       |
| X1,5 Bidang kemudahan melakukan usaha |                                       |

Dengan memperhatikan gambar 3.2 tersebut dapat dijelaskan bahwa penyerapan tenaga kerja sebagai tujuan utama, karena sangat dipengaruhi oleh kualitas pelayanan publik dan perkembangan investasi. Apabila kualitas pelayanan publik yang diberikan oleh Pemerintah dalam mendukung investasi kurang memenuhi standar maka perkembangan investasi akan cenderung mengalami penurunan dan hal ini akan berdampak kepada penurunan penyerapan tenaga kerja.

### **1.3 Hipotesis**

Berdasarkan rumusan masalah dan tujuan penelitian maka hipotesis yang diajukan adalah :

1. Faktor-faktor Pelayanan Publik berpengaruh terhadap investasi asing pada industri manufaktur di Batam
2. Faktor-faktor Pelayanan Publik berpengaruh penyerapan tenaga kerja pada industri manufaktur di Batam
3. Faktor-faktor Pelayanan Publik berpengaruh terhadap investasi asing dan penyerapan tenaga kerja pada industri manufaktur di Batam

## BAB 4

### METODE PENELITIAN

Pada bab empat ini akan dijelaskan mengenai populasi dan penentuan sampel, sumber perolehan data yang diperlukan dalam penelitian, identifikasi variabel, dan definisi operasional yang digunakan untuk menguji hipotesa.

#### 4.1 Jenis dan Rancangan Penelitian

Penelitian ini menekankan kepada pengujian hipotesis, sehingga bersifat verifikatif dengan demikian penelitian ini menggunakan metode penelitian survey yaitu penelitian yang mengambil data secara bersama-sama atas dasar penarikan sampel dari populasi dengan menggunakan instrumen kuesioner.

Sedangkan berdasarkan tujuan penelitian yang telah ditetapkan maka jenis penelitian ini dapat digolongkan sebagai explanotory reseach yaitu jenis penelitian yang berusaha menjelaskan hubungan antar masing-masing variabel.

#### 4.2 Populasi Dan Penentuan Sampel

Populasi dalam penelitian ini adalah industri yang bergerak dalam bidang manufaktur/pabrikasi dimana pengambilan data primer dengan menggunakan kuesioner. Responden adalah tenaga manager pada setiap operator industri dari negara asing yang beroperasi

di Kawasan Industri Batamindo, Batu Ampar, Kabil Indonusa, Batam Centre dan Citra Buana di Batam dengan metode pengambilan sampling yang digunakan adalah "*Simple Random Sampling*". Penentuan besar sampel dilakukan dengan menggunakan rumus Slovin yaitu sebagai berikut :

$$n = \frac{N}{N d^2 + 1}$$

Dimana :

N = besarnya populasi

n = besarnya sampel

d = derajat kecermatan/kepercayaan

Berdasarkan rumus diatas maka jumlah sampel yang diambil sebanyak 110 sampel.

### 4.3 Variabel Penelitian

#### 4.3.1 Indikator Variable

Sesuai dengan teori yang telah dipelajari sebelumnya maka variabel pengaruh (*independent variable*) yang akan diuji adalah Pelayanan Publik yang meliputi beberapa bidang :

1. Kelembagaan
2. Sosial Politik
3. Ekonomi
4. Infrastruktur
5. Kualitas Kehidupan WNA
6. Investor Asing.

Variabel pengaruh tersebut akan diuji hubungannya dengan variabel terpengaruh (*dependent variable*) adalah tingkat kepuasan responden (investor PMA) dalam menanamkan modalnya dan tergantung penyerapan tenaga kerja di Batam.

#### 4.3.2 Definisi Operasional

Penelitian ini dilakukan untuk mengetahui pengaruh Pelayanan Publik terhadap perkembangan investasi asing dan penyerapan tenaga kerja pada industri manufaktur di kota Batam, dengan definisi operasional sebagaimana tersebut pada tabel dibawah ini

**Tabel 4.1 DEFINISI OPERASIONAL**

Variabel	Klasifikasi Variabel	Indikator	Pengukuran
Pelayanan Publik (X1)		Bidang Keamanan (X1.1) Penyediaan Tenaga Kerja (X1.2) Perlakuan kepada Investor(X1.3) Infrastruktur Fisik (X1.4) Kemudahan melakukan Usaha(X1.5) Bid. Lingkungan Sosial Domestik (X1.6) Bid. Kualitas Sumber Daya Alam(X1.7)	Skala Likert

Perkembangan Investasi Asing (X2)		Jumlah Investasi asing bidang industri manufaktur (X2.1)  Jumlah perusahaan asing bidang industri manufaktur (X2.2).	
Penyerapan Tenaga Kerja (Y)		Jumlah tenaga kerja yang diserap (Y)	

Uji diatas akan dilakukan dengan menggunakan software

AMOS

#### 4.4 Bahan dan Alat Penelitian

Bahan dan alat yang digunakan didalam penelitian ini adalah kertas dan alat tulis kantor serta perlengkapan analisis seperti komputer yang dapat menjalankan metode analisis Structural Equation Model.

#### 4.5 Instrumen Penelitian

Instrumen Penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah kuesioner yang berupa daftar pertanyaan tertutup yang dibagikan kepada responden untuk mendapat data primer sedangkan untuk data sekunder diambil dari data statistik yang diterbitkan oleh BPS Kota Batam

#### **4.6 Lokasi dan Waktu Penelitian**

Penelitian dilakukan pada beberapa perusahaan modal asing yang bergerak dalam bidang industri manufactur yang berada dalam kawasan industri di Pulau Batam dan dilakukan survey secara bersama-sama mulai pada bulan Oktober 2004 s/d Pebruari 2005.

#### **4.7 Prosedur Pengambilan dan Pengumpulan Data**

##### **4.7.1 Jenis Data**

Jenis data yang digunakan dalam penelitian ini meliputi beberapa tahapan kegiatan yaitu :

1. Data primer, yaitu data yang bersumber langsung dari responden dari perusahaan industri yang meliputi nama perusahaan, jabatan responden, status perusahaan , jenis produk yang dihasilkan, negara asal perusahaan, persepsi responden terhadap kualitas pelayanan publik yang diberikan oleh Pemerintah.
2. Data Sekunder yaitu data yang digali berupa informasi yang bersumber dari data Batam dalam angka, Laporan perekonomian kota Batam 2003, buku data Otorita Batam tahun 2003 serta teori-teori maupun kebijakan diseputar penelitian.

##### **4.7.2 Sumber Data**

Sumber data yang dapat diambil didalam penelitian ini :

1. Para manager / asisten manager yang berada pada perusahaan yang dipakai sebagai responden.

2. Dinas instansi Pemerintah yang ada di Kota Batam seperti Biro Pusat Statistik Kota Batam untuk data perkembangan investasi dan keadaan sarana dan prasarana, Pemko Batam jumlah tenaga kerja dan kependudukan dan Otorita cq Direktorat Bina usaha untuk data nama dan jumlah perusahaan penanaman modal asing (PMA) yang bergerak dalam bidang industri manufaktur.

#### **4.7.3 Teknik Pengumpulan Data**

1. Penelitian Perpustakaan, yaitu penelitian yang dilakukan dengan cara membaca buku-buku, literatur-literatur, jurnal, majalah ilmiah yang berkaitan dengan objek pembahasan sehingga bahan bacaan ini dapat menjadi landasan teoritis dalam rangka menganalisis masalah.
2. Merancang kuesioner penelitian, disini dibuat pertanyaan-pertanyaan yang berkaitan dengan faktor-faktor yang akan diteliti dengan beberapa jawaban yang menggambarkan kondisi yang dialami oleh responden
3. Penelitian Lapangan, dilakukan penulis dengan membagikan kuesioner kepada responden yang menjadi target penelitian atau yang terlibat langsung dengan objek bahasan.
4. Pengumpulan dan Pengolahan Data, yaitu data-data yang diperoleh dari hasil survei yang dijawab oleh responden melalui kuesioner yang diberikan dikumpul dan dilakukan pengolahan melalui sistem komputerisasi.

#### **4.8 Cara Pengolahan dan Analisis Data**

Data yang terkumpul baik yang berasal dari kuesioner maupun data sekunder akan diolah dan dianalisis dengan menggunakan metode Analisis Structural Equation Models (SEM). Untuk analisis deskriptif digunakan untuk melihat pengaruh dari beberapa indikator yang dapat mempengaruhi pelayanan publik.

Sedangkan untuk analisis SEM akan dilihat pengaruh dari variabel independent terhadap variabel terikat.

## BAB 5

### GAMBARAN UMUM WILAYAH PENELITIAN

#### 5.1 Sejarah Pengembangan Batam

Pulau Batam dengan luas 415 km<sup>2</sup> yang terletak 20 km sebelah tenggara Singapura, merupakan gugusan dari kepulauan Riau. Pada awalnya pengembangan Pulau Batam lebih ditekankan pada pendekatan keamanan (security approach) dengan landasan pemikiran dalam rangka upaya mengembangkan wilayah perbatasan dimana terdapat banyak pulau-pulau kosong yang tak berpenghuni yang rawan dari segi keamanan. Namun dalam perkembangannya selain pendekatan keamanan, ternyata perlu juga diikuti dengan pendekatan kesejahteraan (prosperity approach) sehingga dapat memberikan nilai tambah bagi perkembangan ekonomi daerah tersebut.

Dengan pertimbangan hal tersebut maka sejak tahun 1970 berdasarkan Keppres No. 65 Tahun 1970 Batam dikembangkan untuk tahap pertama sebagai basis logistik dan operasional bagi usaha-usaha yang berhubungan eksplorasi dan eksploitasi minyak dan gas bumi oleh Pertamina, kemudian diikuti dengan dikeluarkannya Keppres No. 74 Tahun 1971 tentang pengembangan Pulau Batam dan sekaligus menetapkan badan pengembangan kawasan Batam yang disebut **Otorita Pengembangan Daerah Industri Pulau Batam** atau disingkat dengan nama **Otorita Batam**.

Dengan melihat bahwa potensi Pulau Batam dapat dikembangkan sebagai kawasan industri maka Pemerintah mengeluarkan Keppres No. 41 Tahun 1973 tentang penetapan seluruh wilayah Pulau Batam sebagai daerah Industri.

Sesuai dengan namanya, Otorita Batam merupakan badan birokrasi yang merupakan kepenjangan tangan pusat pemerintahan, yang mengurus segala keperluan prosedur birokrasi (berhubungan dengan investasi di Batam) menjadi lebih singkat dan cepat, dengan one stop service, sehingga para investor tidak perlu lagi datang ke Jakarta atau ibu kota propinsi untuk mengurus izin dan perlengkapan investasi lainnya. Cukup diselesaikan pada satu badan saja yaitu Otorita Batam, hingga seluruh ijin-ijin seperti ijin prinsip investasi atau lahan dapat diselesaikan di Batam. Selain itu lingkup pekerjaan yang lebih fokus dari Otorita Batam adalah membangun prasarana dan sarana untuk menunjang pengembangan kawasan industri, pariwisata, perdagangan dan alih kapal.

Pada saat pembentukan badan ini, secara Administratif Pemerintahan di Pulau Batam masih merupakan salah satu desa dari Kecamatan Belakang Padang. Setelah itu dengan semakin berkembang pesatnya Batam sehingga persoalan-persoalan kemasyarakatan semakin kompleks maka pada Tahun 1983 Administrasi Pemerintahan ditingkatkan menjadi Kota Administratif sehingga pada saat itu pula sebagian urusan Pemerintahan diserahkan ke Pemerintah Kotamadya Administratif Batam.

Kemudian pada tahun 1999 dikeluarkannya Undang-undang 53 tahun 1999 yang menetapkan Batam sebagai kota otonom dengan wilayah kerja selain Pulau Batam dan pulau-pulau kecil disekelilingnya juga termasuk pulau Rempang, Galang dan Galang Baru dengan demikian wilayah **Administratif Pemko Batam** jauh lebih besar dari wilayah **Kerja Otorita Batam**.

## **5.2. Keadaan Prasarana dan Sarana**

Penyiapan prasarana dan sarana di Kota Batam sangat diperlukan sebagai suatu Kota yang menuju Kota Metropolitan karena tanpa sarana dan prasarana yang memadai Kota Batam tidak akan diminati oleh para investor untuk menanamkan modalnya di Kota Batam. Konsep ini yang dikembangkan sejak awal pengembangan Batam sebagai kawasan industri dimana prasarana dan sarana harus disiapkan dulu sebelum dipasarkan kepada investor.

### **5.2.1. Sarana Perhubungan**

Sarana perhubungan merupakan salah satu sarana yang sangat penting karena sangat berkaitan dengan mobilitas barang dan orang dari dan ke Batam. Saat ini untuk sarana perhubungan laut telah tersedia empat pelabuhan penumpang internasional dengan tujuan Singapura dan Malaysia, dua pelabuhan penumpang domestik dan tiga pelabuhan angkutan barang baik untuk tujuan domestik maupun internasional dengan kapasitas sandar kapal maksimum 35.000 DWT.

Prasarana angkutan udara telah ada sejak tahun 1980 namun kapasitas landasan pacu hanya baru bisa didarati oleh pesawat berbadan kecil seperti Fokker 28. Dengan pertimbangan bahwa Bandara Hang Nadim ini akan dikembangkan menjadi hub untuk wilayah Indonesia maka Pemerintah mengembangkan Bandara ini menjadi Bandara Internasional dengan panjang landasan 4.000 m yang dapat didarati pesawat berbadan lebar seperti Boing 747, Airbus A300 dan DC 10, yang penggunaannya diresmikan pada bulan Desember 1995.

Perkembangan jumlah penumpang berangkat, datang dan transit serta bongkar muat barang melalui Bandara Hang Nadim dalam kurun waktu lima tahun terakhir ini menunjukkan peningkatan yang cukup menggembirakan. Selama tahun 2003 telah jumlah penumpang telah mencapai 1.275.570 orang atau meningkat sebesar 33.38% dari tahun 2002 yang hanya 956.307 orang, sedangkan jumlah bongkar muat barang untuk tahun yang sama telah mencapai 29.237 ton atau naik 30,47 persen dari tahun 2002. Sedangkan penggunaan Bandara ini dalam melayani penerbangan keluar negeri masih terbatas yaitu untuk pelayanan penerbangan transit jemaah haji dari beberapa embarkasi di Indonesia ke Arab Saudi dan penerbangan reguler ke Malaka (Malaysia).

### **5.2.2 Prasarana Utilitas**

Perkembangan jasa utilitas yang ada di Batam yang meliputi jasa Telekomunikasi, Kelistrikan dan Air Bersih cukup memadai. Hal ini bisa dilihat untuk jasa telekomunikasi yang tersedia untuk menghubungkan Batam baik secara nasional maupun internasional dapat dijangkau melalui fasilitas sistem

Telekomunikasi suara (Voice) seperti fix telepon dan telepon selular. Jumlah satuan sambungan telepon yang tersedia sebesar 100.000 ss sehingga hampir sebagian besar sudah dapat menjangkau lapisan masyarakat yang tersebar di Batam, sedangkan untuk komunikasi dengan menggunakan data elektronik juga dapat diperoleh dengan mudah.

Sedangkan untuk prasarana listrik sampai dengan tahun 2003 telah terpasang pembangkit dengan kapasitas sebesar 252,1 MW yang dapat memproduksi energi listrik untuk dapat dijual kepada konsumen sebesar 759.887 MWH (Megawatt Hour). Selain energi listrik yang didistribusikan oleh PT. PLN Batam juga terdapat pembangkit listrik yang disuplay untuk penggunaan sendiri di beberapa kawasan industri dengan total kapasitas sebesar 120 MW.

Kebutuhan Air Minum di Kota Batam bersumber dari air baku yang berasal dari waduk buatan sebanyak 6 buah yaitu waduk Baloi, Sei. Ladi, Sei. Harapan, Nongsa, Muka Kuning dan Duriangkang dengan total kapasitas sebesar 3.850 liter/detik dan dari keenam waduk tersebut sampai dengan saat ini telah terpasang instalasi pengolahan air (IPA) sebesar 1.357 liter/detik, dengan jumlah pelanggan yang paling dominan adalah rumah tangga 67,28% kemudian diikuti oleh konsumen jasa (hotel, industri dan wisata) 29,5%.

### **5.3 Perkembangan Kependudukan dan Ketenagakerjaan**

#### **5.3.1 Kependudukan**

Jumlah penduduk Kota Batam hingga akhir tahun 2003 sebesar 562.661 jiwa dengan komposisi 268.431 jiwa (47,71%) laki-laki

dan 294.230 jiwa (52,29%) perempuan dengan kata lain ratio kelamin (sex ratio) sebesar 91,23% atau dengan kata lain setiap 91 jiwa penduduk laki-laki terdapat 100 jiwa penduduk perempuan.

Pertumbuhan jumlah penduduk yang pesat ini tidak semata-mata dari angka kelahiran tetapi yang terbesar berasal dari arus migrasi dari daerah lain di Indonesia akibat perkembangan pembangunan Batam yang sangat pesat

**TABEL 5.1 PERKEMBANGAN JUMLAH PENDUDUK KOTA BATAM**

**1999 - 2003**

Tahun	Jumlah Penduduk	Pertumbuhan ( % )
1999	336.957	15,93
2000	465.299	38,09
2001	527.151	13,65
2002	533521	1,21
2003	562.661	5,46

Sumber : Laporan Perekonomian Kota Batam 2003, BPS kota Batam

Rata-rata pertumbuhan penduduk selama lima tahun terakhir (1999 – 2003) adalah sebesar 5,91% dan laju pertumbuhan ini agak melambat/terjadi penurunan akibat mulai diberlakukan Perda kependudukan di Kota Batam.

### 5.3.2 Ketenagakerjaan

Jumlah tenaga kerja yang telah terdaftar sampai dengan saat ini sebanyak 187.842 jiwa yang bekerja diberbagai sektor ekonomi dan yang paling banyak menyerap tenaga kerja adalah sektor industri 142.775 jiwa (76,01%), kemudian diikuti sektor bangunan sebanyak 17,526 jiwa (19,33%) serta sektor perdangan hotel dan restoran sebanyak 15,536 jiwa (8,27%), Sedangkan pekerja asing yang bekerja di Batam hanya 2.747 jiwa atau 1,46 persen dari jumlah tenaga kerja seluruhnya.

**TABEL 5.2 PERKEMBANGAN JUMLAH TENAGA KERJA MENURUT SEKTOR EKONOMI TAHUN 1999 – 2003**

No	Sektor Ekonomi	1999	2000	2001	2002	2003
1	Pertanian	1.821	1.840	1.849	1.871	1.900
2	Pertambangan dan penggalian	392	430	457	568	472
3	Industri	111.117	116.139	121.596	129.321	142.775
4	Listrik, gas & Air	656	671	671	686	691
5	Bangunan	14.945	15.813	16.449	17.134	17.526
6	Perdagangan, hotel & Restoran	11.835	12.858	14.184	14.824	15.536
7	Pengangkutan & Komunikasi	2.634	2.765	3.020	1.115	1.176

8	Keuangan, Jasa persewaan & Perusahaan	1.555	1.802	1.952	1.976	2.198
9	Jasa - jasa	4.791	4.965	5.005	5.183	5.571
	Jumlah	149.806	157.283	165.183	172.678	187.842

Sumber : Laporan Perekonomian Kota Batam 2003, BPS kota Batam

Dari data pada Tabel 5.2 diatas dapat dilihat bahwa penyerapan tenaga kerja dari tahun 1999 – 2003 terus meningkat sehingga pada tahun 2003 saja, jumlah tenaga kerja di Batam mengalami penambahan sebesar 8,78 persen atau sebanyak 15,164 jiwa jika dibandingkan dengan keadaan pada akhir tahun 2002.

Selain tenaga kerja formal yang ada di Batam didalam mendukung perkembangan ekonomi juga tidak terlepas dari dukungan tenaga informal yang cukup besar yang bekerja disektor pendukung lainnya.

#### 5.4 Perkembangan Ekonomi

Perkembangan ekonomi di Batam berjalan sangat pesat sekali, dimana dapat dilihat bahwa laju pertumbuhan ekonomi Batam dalam lima tahun terakhir ini jauh berada diatas pertumbuhan ekonomi Propinsi Riau dan Nasional dengan motor penggerak utama adalah sektor industri, perdagangan dan pariwisata.

Laju pertumbuhan ekonomi Batam pada tahun 2003 adalah sebesar 7,73 persen dan kalau dilihat per sektor ekonomi maka sektor industri pengolahan yang mempunyai laju pertumbuhan yang sangat besar.

Sejak pada tahun 1997 disaat Indonesia memasuki krisis ekonomi, kondisi Batam masih memberikan kontribusi pertumbuhan ekonomi yang cukup memadai dimana Batam masih bisa bertumbuh positif rata-rata diatas 3 persen per tahun.

#### **5.4.1 Pendapatan Regional**

Laju pertumbuhan ekonomi Kota Batam dalam tiga tahun terakhir cenderung membaik dan dari data pada tabel 5.3 dapat dilihat bahwa pertumbuhan pada tahun 1999 setelah krisis ekonomi melanda Indonesia pertumbuhan ekonomi Batam masih mencapai 6,38 persen dan terus meningkat dari tahun ke tahun dan pada tahun 2003 pertumbuhan ekonomi Batam telah mencapai 7,73 persen namun pertumbuhan ini belum mencapai target rata-rata pertahun yang diharapkan sebesar 9,63%.

Meskipun belum mencapai target yang diinginkan, pertumbuhan ekonomi yang terjadi pada tahun 2003 telah mampu menggerakkan kegiatan diberbagai sektor ekonomi/ lapangan usaha.

**TABEL 5.3     DISTRIBUSI     PERSENTASE     PDRB     KOTA     BATAM  
MENURUT LAPANGAN USAHA TAHUN 1999 – 2003**

No	Sektor	1999	2000	2001	2002	2003
1	Pertanian	1.62	1.69	1.70	1.71	1.68
2	Pertambangan	0.82	0.79	0.78	0.78	0.75
3	<b>Industri</b>	<b>71.60</b>	<b>70.21</b>	<b>70.06</b>	<b>69.92</b>	<b>70.73</b>
4	Listrik, gas, air	1.20	1.21	1.22	1.24	1.25
5	Bangunan	3.28	3.24	3.53	3.54	3.50
6	Perdagangan	11.13	11.31	11.47	11.61	11.26
7	Angkutan	3.47	3.61	3.80	3.87	3.80
8	Bank, Keuangan	4.90	5.73	5.12	5.03	4.77
9	Jasa -jasa	1.99	2.22	2.31	2.30	2.27
	<b>Total</b>	<b>100,00</b>	<b>100,00</b>	<b>100,00</b>	<b>100,00</b>	<b>100,00</b>

Sumber : Laporan Perekonomian Kota Batam 2003, BPS kota Batam

#### 5.4.2 Perdagangan Luar Negeri

Neraca perdagangan luar negeri Batam selama tahun 2003 mengalami surplus US\$ 736,1 juta. Surplus perdagangan luar negeri tahun ini lebih rendah dibandingkan surplus tahun 2002 yaitu US\$ 910,8 juta atau turun 19,18%. Waupun demikian surplus tahun 2003 ini dapat memberikan andil yang cukup berarti dalam peningkatan perekonomian Kota Batam maupun perekonomian Nasional.

Dalam kurun waktu tahun 1999 – 2003 perkembangan ekspor Batam cukup mengembirakan dan jumlah ekspor yang sangat tinggi terjadi pada tahun 2000 yaitu sebesar US\$ 5.183 juta atau naik 33,4% dari tahun 1999. Namun pertumbuhan ini turun pada tahun 2001 dan mulai menaik lagi pada tahun 2002 sampai tahun 2003.

**TABEL 5.4. PERKEMBANGAN EKSPOR KOTA BATAM 1999 – 2003.**

Tahun	Nilai (juta US\$)	Perubahan (%)
1999	3.885,58	11,76
2000	5.183,22	33,40
2001	3.793,89	(26,80)
2002	3.870,90	2,03
2003	3.911,20	1,04

Sumber : Laporan Perekonomian Kota Batam 2003, BPS kota Batam

Negara tujuan ekspor terbesar pada tahun 2003 masih dipegang oleh Singapura dengan nilai ekspor sebesar US\$ 2.491,4 juta atau sebesar 63,7% dari total nilai ekspor Batam dan diikuti oleh Jepang ditempat kedua dengan nilai sebesar US\$. 342,6 juta dan Amerika ditempat ketiga dengan nilai sebesar US\$ 224,1 juta atau 5,73%.

Dari komoditi yang diekspor dari Kota Batam komponen elektronik memberikan kontribusi sebesar 40,4 persen dengan nilai ekspor sebesar US\$ 1.607,5 juta diikuti kelompok komoditi mesin-mesin dan kelompok komoditi barang-barang dari besi baja dengan kontribusi masing-masing sebesar US\$ 1.494 juta (38,2%) dan US\$ 179,9 juta (4,6%)

### **5.5 Perkembangan Investasi**

Investasi yang dilakukan dalam pembangunan ekonomi di Kota Batam berasal dari sektor pemerintah maupun sektor swasta. Investasi yang dilaksanakan oleh sektor pemerintah dibiayai melalui APBN maupun APBD sedangkan investasi sektor swasta dilakukan melalui PMA (Penanaman Modal Asing) dan PMDM ( Penanaman Modal Dalam Negeri).

Investasi sektor Pemerintah sebagian besar ditujukan untuk pengembangan sarana dan prasarana yang akan mendukung investasi swasta. Iklim investasi di Batam tidak dapat dilepas dari iklim investasi di Indonesia sehingga perkembangannya juga sangat dipengaruhi oleh iklim investasi di negara ini. Dalam upaya menarik dan menggiatkan kegiatan investasi di Batam dengan berbagai kemudahan yang diberikan oleh pemerintah kepada investor salah satu yang terpenting dan satu-satunya di Indonesia adalah kewenangan yang diberikan kepada Otorita Batam untuk memberikan izin penanaman modal bagi PMDN tanpa harus menunggu persetujuan pemerintah pusat.

Penanaman modal antara PMA dan PMDN pada saat ini berimbang. Jumlah perusahaan asing tahun 2003 berencana menanamkan modalnya di Batam menunjukkan peningkatan 10% yaitu sebanyak 77 perusahaan sedangkan dari nilai investasi terjadi penurunan dari US\$ 203,07 juta tahun 2002 menjadi hanya sebesar US\$ 149,61 juta tahun 2003 atau turun sebesar 26,33 persen.

**TABEL 5.5 PERKEMBANGAN INVESTASI PMA DI KOTA BATAM TAHUN 1999 – 2003**

Periode	Jumlah Perusahaan	Nilai (juta US \$)
1999	47	3.058,73
2000	77	138,89
2001	60	437,54
2002	70	203,07
2003	77	149,61

Sumber : Laporan Perekonomian Kota Batam 2003, BPS kota Batam

Sedangkan perkembangan investasi dalam negeri PMDN sejak awal tahun 2002 s/d tahun 2003 kurang mengembirakan karena pada periode tersebut tidak terdapat satupun perusahaan yang berinvestasi di Kota Batam.

**BAB 6****HASIL PENELITIAN DAN ANALISIS HASIL PENELITIAN**

Penelitian ini menggunakan data yang dikumpulkan dari responden yang terdiri dari para manager perusahaan swasta asing yang bergerak dalam bidang industri manufaktur. Jumlah yang dikumpulkan sebanyak 110 responden dengan demikian telah memenuhi syarat analisis Struktural Equation Modeling sebagaimana yang disarankan oleh Hair (1998) dan Bentler (1996)

**5.1 Gambaran Responden Penelitian**

Dari gambaran responden dapat dilihat bahwa dari 110 responden hampir 90 % bergerak dalam bidang industri manufaktur khusus untuk bidang elektronik sedangkan sisanya 10 % responden dalam bidang listrik dan komponen serta dalam industri logam sedangkan apabila dilihat dari kawasan industri maka hampir 78 % responden berada pada kawasan industri Batamindo yang memang merupakan kawasan industri yang terbesar di Batam sedangkan sisanya tersebar pada beberapa kawasan industri .

## 5.2 Analisis Struktural Equation Model atas variabel-variabel

### Pelayanan Publik

#### 5.2.1 Hasil Uji Validitas

Hasil pengujian validitas dari model penelitian ini menunjukkan bahwa variabel manifes yang dijadikan instrumen untuk mengukur variabel laten dari 7 indikator terdapat 5 indikator yang valid sehingga model ini adalah valid atau sah sebagaimana ditunjukkan oleh nilai lamda yang lebih kecil dari 0,4 sebagai rule of thumb untuk penentuan uji validitas, hal ini dapat dilihat pada tabel 6.1 dibawah ini ;

**TABEL 6.1 UJI VALIDITAS PELAYANAN PUBLIK**

Indikator	Lamda	Critical Ratio	Keterangan
Bid. Keamanan (X1.1)	0,73	3,59	Valid
Bid. Tenaga Kerja (X1.2)	0,58	4,69	Valid
Bid. Perlakuan kepada Investor (X1.3)	0,16	1,40	Tidak Valid
Bid. Infrastruktur Fisik (X1.4)	0,66	5,06	Valid
Bid. Kemudahan lakukan Usaha (X1.5)	0,43	3,65	Valid
Bid. Lingkungan Sosial domes (X1.6)	0,03	0,22	Tidak Valid
Bid. Kualitas sumber Daya Alam (X1.7)	0,48	4,01	Valid

### Hasil olahan peneliti dengan SEM

Dari lima indikator yang valid atau sah tersebut kemudian dilakukan uji reliabilitas model menunjukkan bahwa hasil dari variabel-variabel tersebut adalah reliabel sehingga dapat digunakan untuk mengukur hipotesis, hal ini dapat dilihat pada tabel 6.2 dibawah ini ;

**TABEL 6.2 UJI RELIABILITAS PELAYANAN PUBLIK**

Indikator	Delta	Critical Ratio	Keterangan
Bid. Keamanan (X1.1)	0,16	4,71	Reliabel
Bid. Tenaga Kerja (X1.2)	0,15	6,49	Reliabel
Bid. Infrastruktur Fisik (X1.4)	0,25	6,94	Reliabel
Bid. Kemudahan lakukan Usaha (X1.5)	0,18	6,79	Reliabel
Bid. Kualitas sumber Daya Alam (X1.7)	0,33	4,63	Reliabel

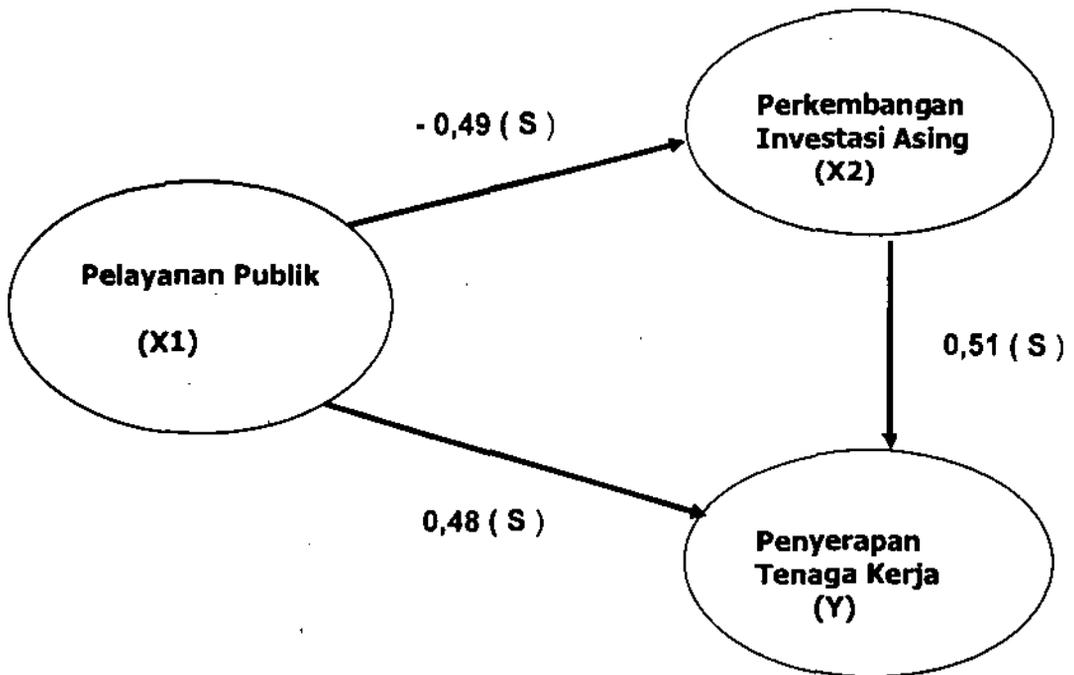
Hasil olahan peneliti dengan SEM

Berdasarkan atas hasil pengujian statistik atas masing-masing variabel indikator terhadap variabel laten, dapat disampaikan bahwa seluruh indikator adalah signifikan. Signifikan ditunjukkan oleh hasil uji seluruh variabel yang nyata pada  $\alpha < 0,05$ .

**TABEL 6.3 PENGARUH PELAYANAN PUBLIK TERHADAP PERKEMBANGAN INVESTASI ASING DAN PENYERAPAN TENAGA KERJA**

Varibel Laten	Koefisien Jalur	Critical Ratio	Keterangan
Pengaruh Pelayanan Publik ( X1 ) terhadap Perkembangan Investasi Asing ( X2 )	- 0,49	-3,57	Signifikan
Pengaruh Pelayanan Publik ( X1 ) terhadap Penyerapan Tenaga Kerja ( X2 )	0,46	3,14	Signifikan
Pengaruh Perkembangan Investasi Asing ( X2 ) terhadap Penyerapan Tenaga Kerja ( y )	0,51	3,15	Signifikan

Hasil olahan peneliti dengan SEM



**Gambar 6.1** HASIL PENGOLAHAN MODEL STRUKTURAL PENGARUH PELAYANAN PUBLIK TERHADAP PERKEMBANGAN INVESTASI ASING DAN PENYERAPAN TENAGA KERJA

**Keterangan : S ( Signifikan  $p < 0,05$  )**

Dengan deskripsi yang signifikan ini menunjukkan bahwa hipotesis yang dirumuskan pada angka 1 s.d 3 pada BAB III angka 1.3 dapat diterima dengan demikian ini menunjukkan bahwa pengaruh Pelayanan Publik terhadap perkembangan investasi asing dan pengaruh Pelayanan Publik terhadap penyerapan tenaga kerja serta pengaruh Pelayanan Publik dan Perkembangan Investasi Asing terhadap Penyerapan Tenaga Kerja adalah signifikan.

## BAB 7

### P E N U T U P

Pada Bab ini mau menguraikan tentang simpulan yang dihasilkan, dan implikasi serta saran yang berkaitan dengan perumusan masalah.

#### 7.1 Kesimpulan

Berdasarkan hasil analisis dan pembahasan yang telah dilakukan pada Bab sebelumnya maka dapat ditarik beberapa simpulan sebagai berikut :

1. Hipotesis 1 menyatakan bahwa faktor Pelayanan Publik berpengaruh terhadap peningkatan Investasi Asing pada industri manufaktur di kota Batam hal ini ditunjukkan dengan pengaruh yang sangat bermakna dengan koefisien jalur  $-0,49$  dan critical ratio  $-3,57$
2. Hipotesis 2 menyatakan bahwa faktor Pelayanan Publik berpengaruh terhadap Penyerapan Tenaga Kerja pada industri manufaktur di kota Batam hal ini ditunjukkan dengan pengaruh yang sangat bermakna dengan koefisien jalur  $0,46$  dan critical ratio  $3,14$
3. Hipotesis 3 menyatakan bahwa faktor Pelayanan Publik dan Peningkatan Investasi Asing berpengaruh terhadap Penyerapan Tenaga Kerja pada industri manufaktur di kota Batam hal ini ditunjukkan dengan pengaruh yang sangat bermakna dengan koefisien jalur  $0,51$  dan critical ratio  $3,15$

## 7.2 Saran

Setelah melihat simpulan yang dapat diambil maka kami dapat memberikan beberapa saran-saran yang dapat dipergunakan oleh instansi Pemerintah yang ada di Batam sebagai berikut :

1. Mengingat Pelayanan Publik sangat signifikan didalam peningkatan Investasi Asing maka pihak pemerintah harus tetap menjaga kualitas dan kuantitas sarana publik yang sudah ada untuk tetap lebih baik sedangkan bidang-bidang pelayanan publik lainnya terus diperbaharui dan diperbaiki serta dikembangkan sesuai dengan asas-asas pelayanan publik .
2. Karena adanya peningkatan Investasi Asing akibat pelayanan publik yang baik maka pihak pemerintah harus tetap menjaga kondisi yang kondusif ini sehingga dapat meningkatkan daya saing dan daya tarik Batam bagi investor asing dalam menciptakan lapangan kerja bagi Kota Batam khususnya dan Indonesia pada umumnya sehingga dapat mengurangi jumlah pengangguran yang ada diBatam.

## DAFTAR PUSTAKA

- Anshori, Muslich (1996), **Manajemen Produksi dan Operasi: Konsep dan Kerangka Dasar**, edisi pertama PT. Bina Ilmu, Surabaya
- Assael, Henry. (1992), **Consumer Behaviour and Marketing Action**, Fourth Edition, PWS Kent Publishing Company, Boston.
- Buletin 61/bapekin/pu.go.id, **Pembinaan Konstruksi dan Investasi di Indonesia**, Pusat Pengembangan Investasi Indonesia, Jakarta
- Biro Hukum dan Organisasi Depnakertrans, (2003), **Undang-Undang Republik Indonesia No. 13 Tahun 2003 Tentang Ketenagakerjaan, Lembaran Negara RI tahun 2003 No.39**, Jakarta
- Djawarto, Ps (1994), **Mengenal Beberapa Uji Statistik Dalam Penelitian**, Cetakan Pertama, Penerbit Liberty, Yogyakarta.
- Dracker, Peter (1973), **Management, Task, Responsibilities**, Harper & Row, New York.
- Dunn William N. (1994), **Public Policy Analysis**, Terjemahan Gadjah Mada University Press, Yogyakarta
- Engel, James F., Roger Blackwell., and Paul Miniard. (1993), **Consumer Behaviour**, Seventh Edition, The Dreyent Press, New York.
- Hawkins, Del. I., Roger J. Best., and Kennet A.Coney (1995), **Consumer Behaviour: Implication for Marketing Strategy**, Sixth Edition, Richard D. Irwin, Inc.,USA
- Harry Heriawan S, (2005), **Persaingan Tenaga Kerja Dalam Era Globalisasi**, Pustaka Sinar Harapan , Jakarta.

- Hosmer Jr, David W., and Stanley Lemeshow, (1989), **Applied Logistic Regression**, John Wiley & Son, New York.
- Hunger, J.David, (2001), **Manajemen Strategis**, Penerbit Andi, Yogyakarta
- Hill, Charles W.L (2003), **International Bussiness Competing in Global Marketplace**, Fourth Edition, McGraw-Hill Higher Education.
- Keputusan menteri Pendayagunaan aparatur negara .63/kep/impan/7/2003  
**Kerangka Refleksi Sektor Pelayanan Publik Kkppi.go.id/**
- Kotler, Philip (1997), **Marketing Management Analysis, Planning, Implementation, and Control, Ninth Edition**, A Paramount Communication Company, Engelwood Cliff, New Jersey.
- Loudon, David L. and Albert J. Della Bitta (1993), **Consumer Behaviour, Concept and Application**, McGraw-Hill, Inc., USA.
- Political Economic Risk Consultancy (2002), **Batam Risk Report**, Hongkong.
- Radiosunu (1993), **Manajemen Pemasaran, Suatu Pendekatan Analisis**, Edisi-2 BPFE UGM, Yogyakarta.
- Rodoni Ahmad (2002), **Analisis Investasi & Teori Portfolio**, PT.Rajagrafindo Persada, Jakarta.
- Singarimbun Masri (1995), **Metode Penelitian Survai**, PT. Pustaka Lembaga Penelitian, Pendidikan dan Penerangan Ekonomi dan Sosial (LP3S) Indonesia, Jakarta.
- Umar Husein., (1997), **Metodologi Penelitian: Aplikasi Dalam Pemasaran**, PT. Gramedia Pustaka Utama, Jakarta.

Wijaya, I.G., (2000), **Penanaman Modal. Pedoman Prosedur Mendirikan dan Menjalankan Perusahaan Dalam Rangka PMA dan PMDN**, PT. Pradnya Paramita, Jakarta.

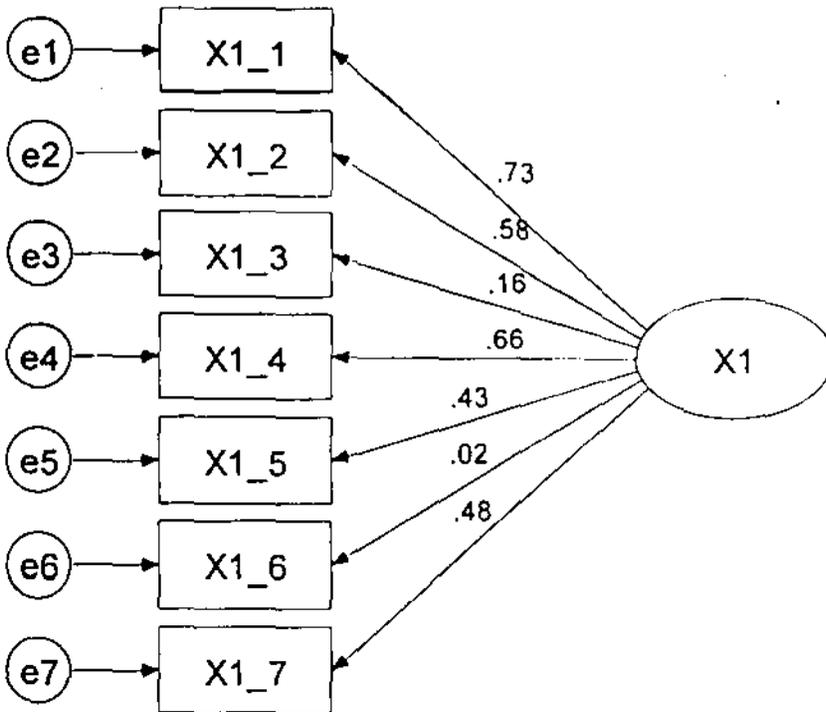
Willy R. W (2003), **Undang-Undang Republik Indonesia No. 14 tahun 1969 Tentang Ketentuan Pokok Mengenai Tenaga Kerja**, Indonesia Law Information.

World bank group.com/ **Doing Business Indicators**, World Bank United States

Zainuddin, Muhamad, (1997) **Metodologi Penelitian** (modul kuliah Pascasarjana Unair).

Zealtman, Gerard., and Malenia Wallendorf, (1979) **Consumer Behaviour : Basic Finding and Management Implication**, John Wiley & Sons. Inc, New York.

# LAMPIRAN



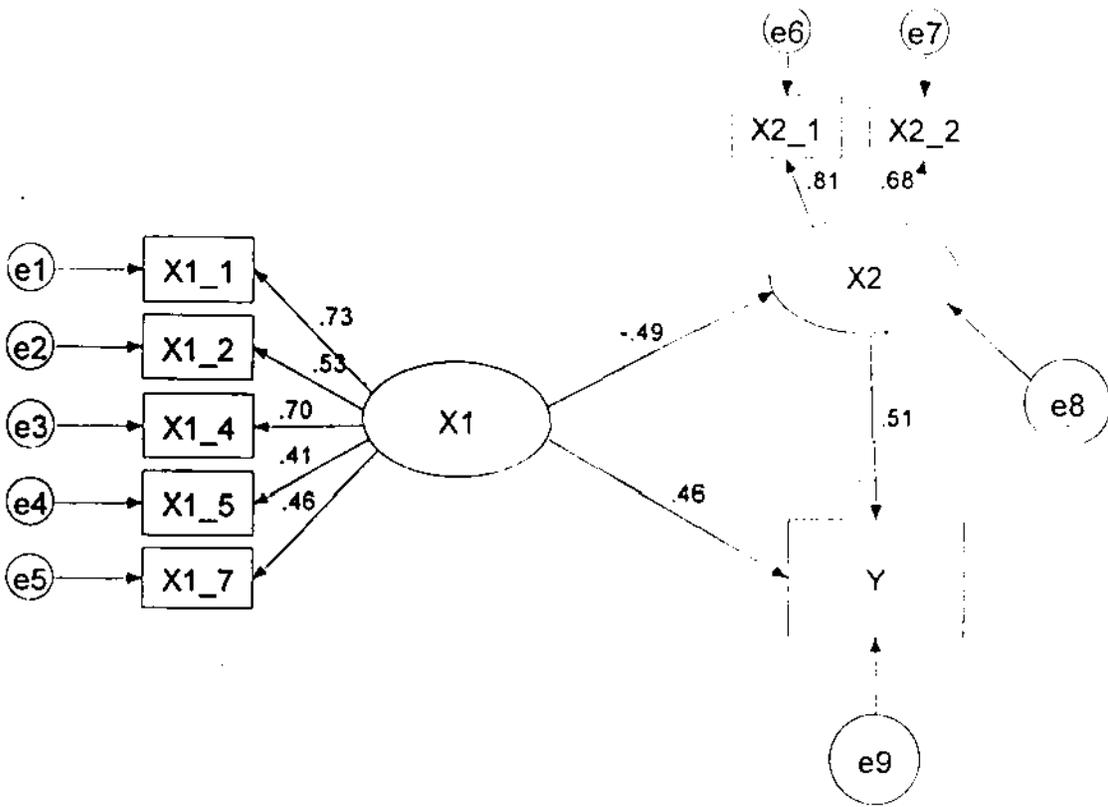
Estimates (Group number 1 - Default model)

Scalar Estimates (Group number 1 - Default model)

Maximum Likelihood Estimates

Regression Weights: (Group number 1 - Default model)

	Estimate	S.E.	C.R.	P	Label
X1_1<---X1	1.000				
X1_2<---X1	.631	.134	4.697	***	
X1_3<---X1	.213	.151	1.404	.160	
X1_4<---X1	.828	.164	5.056	***	
X1_5<---X1	.556	.152	3.653	***	
X1_6<---X1	.028	.127	.223	.823	
X1_7<---X1	.530	.132	4.009	***	



Estimates (Group number 1 - Default model)

Scalar Estimates (Group number 1 - Default model)

Maximum Likelihood Estimates

Regression Weights: (Group number 1 - Default model)

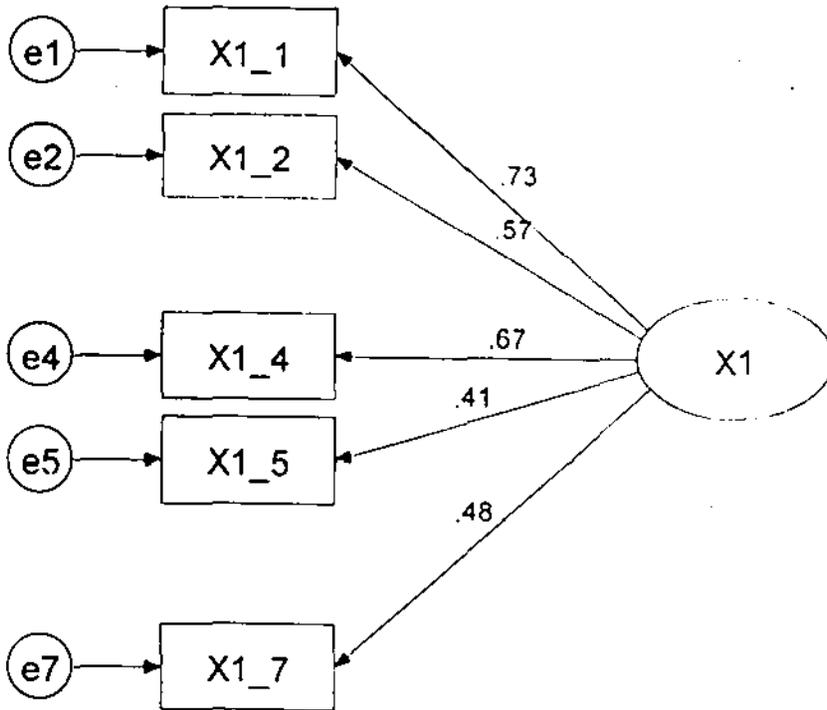
	Estimate	S.E.	C.R.	P	Label
X2 <--- X1	-.961	.269	-3.565	***	
X1_1 <--- X1	1.000				
X1_2 <--- X1	.574	.124	4.640	***	
X1_4 <--- X1	.874	.154	5.677	***	
X1_5 <--- X1	.529	.145	3.655	***	
X1_7 <--- X1	.510	.125	4.077	***	
X2_1 <--- X2	1.000				
X2_2 <--- X2	.624	.140	4.473	***	
Y <--- X2	.255	.081	3.148	.002	
Y <--- X1	.452	.144	3.143	.002	

**Standardized Regression Weights: (Group number 1 - Default model)**

	Estimate
K1_1<--- X1	.727
K1_2<--- X1	.574
K1_4<--- X1	.673
K1_5<--- X1	.411
K1_7<--- X1	.476

**Variances: (Group number 1 - Default model)**

	Estimate	S.E.	C.R.	P	Label
K1	.180	.050	3.586	***	
1	.161	.037	4.390	***	
2	.143	.023	6.090	***	
4	.156	.030	5.135	***	
5	.254	.037	6.862	***	
7	.174	.026	6.629	***	



Estimates (Group number 1 - Default model)

Scalar Estimates (Group number 1 - Default model)

Maximum Likelihood Estimates

Regression Weights: (Group number 1 - Default model)

	Estimate	S.E.	C.R.	P	Label
X1_1<---X1	1.000				
X1_2<---X1	.624	.134	4.658	***	
X1_4<---X1	.846	.166	5.086	***	
X1_5<---X1	.536	.152	3.532	***	
X1_7<---X1	.531	.132	4.010	***	

## Standardized Regression Weights: (Group number 1 - Default model)

	Estimate
X1_1<--- X1	.727
X1_2<--- X1	.580
X1_3<--- X1	.157
X1_4<--- X1	.659
X1_5<--- X1	.427
X1_6<--- X1	.025
X1_7<--- X1	.475

## Variances: (Group number 1 - Default model)

	Estimate	S.E.	C.R.	P	Label
X1	.180	.050	3.596	***	
e1	.161	.036	4.410	***	
e2	.141	.023	6.049	***	
e3	.323	.044	7.319	***	
e4	.161	.030	5.312	***	
e5	.250	.037	6.812	***	
e6	.235	.032	7.381	***	
e7	.174	.026	6.632	***	

Standardized Regression Weights: (Group number 1 - Default model)

	Estimate
X2 <--- X1	-.487
X1_1 <--- X1	.734
X1_2 <--- X1	.533
X1_4 <--- X1	.702
X1_5 <--- X1	.410
X1_7 <--- X1	.461
X2_1 <--- X2	.807
X2_2 <--- X2	.676
Y <--- X2	.513
Y <--- X1	.460

Variances: (Group number 1 - Default model)

	Estimate	S.E.	C.R.	P	Label
1	.183	.048	3.798	***	
8	.545	.173	3.150	.002	
1	.157	.033	4.712	***	
2	.152	.023	6.499	***	
3	.144	.028	5.136	***	
4	.254	.037	6.938	***	
5	.177	.026	6.785	***	
6	.382	.152	2.512	.012	
7	.331	.072	4.631	***	
9	.133	.022	5.926	***	

Matrices (Group number 1 - Default model)

Total Effects (Group number 1 - Default model)

	X1	X2
X2	-.961	.000
Y	.207	.255
X2_2	-.600	.624
X2_1	-.961	1.000
X1_7	.510	.000
X1_5	.529	.000
X1_4	.874	.000
X1_2	.574	.000
X1_1	1.000	.000

**Standardized Total Effects (Group number 1 - Default model)**

	X1	X2
X2	-.487	.000
Y	.211	.513
X2_2	-.329	.676
X2_1	-.393	.807
X1_7	.461	.000
X1_5	.410	.000
X1_4	.702	.000
X1_2	.533	.000
X1_1	.734	.000

**Direct Effects (Group number 1 - Default model)**

	X1	X2
X2	-.961	.000
Y	.452	.255
X2_2	.000	.624
X2_1	.000	1.000
X1_7	.510	.000
X1_5	.529	.000
X1_4	.874	.000
X1_2	.574	.000
X1_1	1.000	.000

**Standardized Direct Effects (Group number 1 - Default model)**

	X1	X2
X2	-.487	.000
Y	.460	.513
X2_2	.000	.676
X2_1	.000	.807
X1_7	.461	.000
X1_5	.410	.000
X1_4	.702	.000
X1_2	.533	.000
X1_1	.734	.000

## Indirect Effects (Group number 1 - Default model)

	X1	X2
X2	.000	.000
Y	-.245	.000
X2_2	-.600	.000
X2_1	-.961	.000
X1_7	.000	.000
X1_5	.000	.000
X1_4	.000	.000
X1_2	.000	.000
X1_1	.000	.000

## Standardized Indirect Effects (Group number 1 - Default model)

	X1	X2
X2	.000	.000
Y	-.250	.000
X2_2	-.329	.000
X2_1	-.393	.000
X1_7	.000	.000
X1_5	.000	.000
X1_4	.000	.000
X1_2	.000	.000
X1_1	.000	.000

## Model Fit Summary

CMIN

Model	NPAR	CMIN	DF	P	CMIN/DF
Default model	18	31.054	18	.028	1.725
Saturated model	36	.000	0		
Independence model	8	191.478	28	.000	6.839

## RMR, GFI

Model	RMR	GFI	AGFI	PGFI
Default model	.025	.938	.876	.469
Saturated model	.000	1.000		
Independence model	.110	.654	.556	.509

## Baseline Comparisons

Model	NFI Delta1	RFI rho1	IFI Delta2	TLI rho2	CFI
Default model	.838	.748	.925	.876	.920
Saturated model	1.000		1.000		1.000
Independence model	.000	.000	.000	.000	.000

## Parsimony-Adjusted Measures

Model	PRATIO	PNFI	PCFI
Default model	.643	.539	.592
Saturated model	.000	.000	.000
Independence model	1.000	.000	.000

## NCP

Model	NCP	LO 90	HI 90
Default model	13.054	1.384	32.562
Saturated model	.000	.000	.000
Independence model	163.478	123.340	211.112

## FMIN

Model	FMIN	F0	LO 90	HI 90
Default model	.285	.120	.013	.299
Saturated model	.000	.000	.000	.000
Independence model	1.757	1.500	1.132	1.937

## RMSEA

Model	RMSEA	LO 90	HI 90	PCLOSE
Default model	.082	.027	.129	.138
Independence model	.231	.201	.263	.000

## AIC

Model	AIC	BCC	BIC	CAIC
Default model	67.054	70.294	115.662	133.662
Saturated model	72.000	78.480	169.217	205.217
Independence model	207.478	208.918	229.082	237.082

## ECVI

Model	ECVI	LO 90	HI 90	MECVI
Default model	.615	.508	.794	.645
Saturated model	.661	.661	.661	.720
Independence model	1.903	1.535	2.340	1.917

## HOELTER

Model	HOELTER .05	HOELTER .01
Default model	102	123
Independence model	24	28

No Kuesioner	Nama Perusahaan	Lokasi	X1.1	X1.2	X1.3	X1.4	X1.5	X1.6	X1.7	X2.1	X2.2	f(x)
1	AIT	Batamindo, Mukakuning	3	3	3	4	2	4	3	3	3	3
2	Nissin Kogyo	Batamindo, Mukakuning	2	2	2	2	3	3	3	4	4	3
3	TEAC	Batamindo, Mukakuning	4	3	4	3	4	4	3	2	4	3
4	TEC	Batamindo, Mukakuning	3	3	4	3	3	3	3	2	3	3
5	Sanyo Precision	Batamindo, Mukakuning	3	2	3	3	2	3	2	4	4	3
6	BMB	Batamindo, Mukakuning	3	3	3	3	3	3	3	6	3	4
7	Solectron	Batamindo, Mukakuning	3	3	4	2	3	3	3	6	4	3
8	Toyocom	Batamindo, Mukakuning	4	3	4	4	3	4	3	2	2	3
9	Flairis	Batamindo, Mukakuning	2	2	3	3	3	3	3	2	3	3
10	Schneider Electric	Batamindo, Mukakuning	2	2	2	3	2	4	3	2	3	3
11	MKPI	Batamindo, Mukakuning	2	3	3	3	3	3	3	2	3	3
12	Japan Servo	Batamindo, Mukakuning	3	3	4	3	3	3	3	2	3	3
13	Epson	Batamindo, Mukakuning	3	3	3	3	3	3	3	2	4	3
14	SOC	Batamindo, Mukakuning	3	3	4	3	3	3	3	3	3	2
15	Sincom	Puri, Batam Center	2	3	4	3	3	3	3	6	4	3
16	Giken	Citrabuana, Batu Ampar	3	2	4	3	3	3	3	1	2	2
17	Philips	Batamindo, Mukakuning	3	2	3	3	4	3	4	2	3	4
18	Asahi	Batamindo, Mukakuning	3	3	3	3	3	4	3	1	1	3
19	Sanyo Energy	Batamindo, Mukakuning	4	4	4	4	4	4	4	2	6	4
20	GMAC	Batamindo, Mukakuning	3	3	3	3	3	3	4	2	3	3
21	Ex batam	Batamindo, Mukakuning	4	3	3	3	2	3	3	2	2	2
22	Sanmina	Batamindo, Mukakuning	4	4	4	3	3	4	4	3	2	3
23	Sumitomo	Batamindo, Mukakuning	3	3	4	3	3	3	3	3	3	3
24	Exas	Batamindo, Mukakuning	4	3	3	3	3	4	3	3	2	3
25	KIT	Sagulung, Tanjung Uncang	3	3	4	4	4	3	4	4	3	3
26	Plexus	Batamindo, Mukakuning	3	3	4	3	4	4	3	1	2	2
27	Noble	Batamindo, Mukakuning	3	3	3	3	3	3	3	2	3	3

dilanjutkan .....

No Kuesioner	Nama Perusahaan	Lokasi	X1.1	X1.2	X1.3	X1.4	X1.5	X1.6	X1.7	X2.1	X2.2	f(x)
28	Shinetsu	Batamindo, Mukakuning	4	3	3	3	3	3	3	2	3	3
29	Kyocera	Batamindo, Mukakuning	3	3	2	3	2	3	3	4	2	3
30	Rubycon	Batamindo, Mukakuning	3	3	4	3	3	3	3	3	3	3
31	Maruwa	Bintang, Tanjung Uncang	3	2	4	3	2	3	3	3	3	3
32	Thomson	Batamindo, Mukakuning	4	3	3	4	3	4	4	3	3	3
33	BJ Industries	Batamindo, Mukakuning	4	3	4	4	3	3	3	1	2	3
34	Infineon	Batamindo, Mukakuning	4	3	4	4	3	3	4	3	3	3
35	Varta	Batamindo, Mukakuning	3	3	3	4	3	3	3	1	2	3
36	PCI	Batamindo, Mukakuning	4	3	3	3	4	3	4	1	2	3
37	Matsushita Elec	Batamindo, Mukakuning	4	3	4	4	4	3	4	2	2	3
38	SES	Batamindo, Mukakuning	3	3	4	4	3	3	4	2	2	3
39	OMNI	Batamindo, Mukakuning	4	3	3	4	4	3	3	1	2	3
40	Siix	Batamindo, Mukakuning	3	3	4	4	3	3	4	1	2	3
41	Galaxy	Batamindo, Mukakuning	4	2	2	3	3	3	3	1	2	3
42	Perkin	Batamindo, Mukakuning	4	3	3	4	3	3	3	1	2	3
43	PFU	Batamindo, Mukakuning	4	3	3	4	4	3	4	2	3	4
44	Shintom	Batamindo, Mukakuning	4	2	3	4	3	3	3	2	2	3
45	Singacom	Batamindo, Mukakuning	3	3	3	4	2	3	4	2	3	3
46	Sony	Batamindo, Mukakuning	3	2	3	4	3	3	3	2	3	3
47	OKI	Batamindo, Mukakuning	4	3	3	4	3	3	4	2	3	4
48	Siemen E B	Batamindo, Mukakuning	4	3	3	4	3	3	3	1	1	3
49	Precision	Bintang, Batu Ampar	4	3	3	3	3	4	3	1	2	3
50	Foster Electric	Batamindo, Mukakuning	4	3	4	4	4	3	4	2	2	3
51	Toyoplas	Batamindo, Mukakuning	4	3	3	4	4	4	3	2	2	4
52	Sanwa Eng	Batamindo, Mukakuning	4	3	3	3	2	4	3	2	3	4
53	Fujitec	Batamindo, Mukakuning	4	3	4	3	4	3	3	3	3	4
54	Shimano	Batamindo, Mukakuning	3	3	3	3	4	4	3	3	3	3
55	Surya Teknologi	Batamindo, Mukakuning	3	3	4	3	3	3	4	2	2	3

No Kuesioner	Nama Perusahaan	Lokasi	X1.1	X1.2	X1.3	X1.4	X1.5	X1.6	X1.7	X2.1	X2.2	f(x)
56	Sansyu	Batamindo, Mukakuning	3	3	3	3	3	4	4	2	2	3
57	Seagate	Batamindo, Mukakuning	3	3	3	3	3	4	3	1	2	3
58	AAB Batam	Batamindo, Mukakuning	4	3	4	3	4	4	3	2	3	3
59	Kumagaya	Batamindo, Mukakuning	4	3	3	4	3	3	3	2	3	4
60	Tropical Electronic	Batamindo, Mukakuning	4	3	4	4	3	3	4	2	2	3
61	Siemens H I B	Batamindo, Mukakuning	4	3	3	4	3	3	3	2	2	3
62	Eminent PBI	Batamindo, Mukakuning	3	3	3	3	3	3	3	1	2	3
63	Alteco C I	Batamindo, Mukakuning	4	3	4	3	4	4	3	1	3	3
64	Singamip C W	Batamindo, Mukakuning	3	3	3	3	3	4	3	2	2	3
65	Yokogawa	Batamindo, Mukakuning	4	3	3	4	4	3	3	2	3	3
66	Chiyoda E I	Batamindo, Mukakuning	3	3	4	4	3	3	4	3	2	3
67	Evo Rifa	Batamindo, Mukakuning	4	3	3	4	4	3	4	1	2	3
68	Greenleaf	Batamindo, Mukakuning	4	3	3	3	3	4	3	1	2	3
69	EE Cheng MWBI	Batamindo, Mukakuning	4	3	4	4	4	3	4	2	3	3
70	uwatec Batam	Batamindo, Mukakuning	3	3	3	4	3	4	3	2	2	4
71	Viking Life Saving	Batamindo, Mukakuning	3	3	4	4	4	3	3	2	3	4
72	Polestar	Batamindo, Mukakuning	3	3	3	3	3	3	3	3	2	4
73	Etowa	Batamindo, Mukakuning	3	3	3	3	3	3	3	3	2	3
74	Heng Huat PII	Batamindo, Mukakuning	3	3	3	3	3	4	3	3	3	3
75	Wesenindo MS	Batamindo, Mukakuning	3	3	3	4	3	4	3	1	2	3
76	Minamoto	Batamindo, Mukakuning	4	3	3	3	4	4	3	2	2	3
77	E TECH MI	Batamindo, Mukakuning	4	3	3	4	3	3	3	2	3	3
78	Wireforms BI	Batamindo, Mukakuning	4	3	4	4	3	4	4	1	2	3
79	Nok PCS	Batamindo, Mukakuning	4	3	4	4	3	2	4	1	2	3
80	Hongfoong PI	Batamindo, Mukakuning	3	3	4	3	3	4	3	2	2	3
81	Yeakin Plastic I	Batamindo, Mukakuning	3	2	3	3	3	3	3	2	2	3
82	Indonesia Toyo D	Batamindo, Mukakuning	4	3	3	4	3	3	4	2	3	3
83	Hymold Batam	Batamindo, Mukakuning	4	3	4	3	4	4	3	2	2	3

dilanjutkan .....

No Kuesioner	Nama Perusahaan	Lokasi	X1.1	X1.2	X1.3	X1.4	X1.5	X1.6	X1.7	X2.1	X2.2	f(x)
84	Panatec MB	Batamindo, Mukakuning	4	3	3	4	3	3	3	1	3	3
85	Brilliant P	Panbil, Mukakuning	4	3	4	3	4	4	3	2	3	3
86	Inzigin	Batamindo, Mukakuning	4	3	4	4	3	4	4	2	3	3
87	Patlite I	Batamindo, Mukakuning	3	3	4	4	3	3	4	2	3	4
88	JST I	Batamindo, Mukakuning	3	3	4	3	3	4	3	1	1	3
89	JMS Batam	Batamindo, Mukakuning	4	4	3	4	4	3	4	1	2	3
90	Acropolis Electronic	Cammo, Batam Centre	4	3	4	3	4	4	3	1	2	3
91	Innovalue Tech	Cammo, Batam Centre	4	3	3	4	3	3	3	1	2	3
92	Pratama ES	Cammo, Batam Centre	4	3	4	4	3	4	3	1	2	3
93	Titanteck I	Cammo, Batam Centre	4	3	4	4	4	4	4	1	2	3
94	Atech EI	Kara IP	4	3	3	4	3	3	4	1	1	3
95	FMC Batam	Kara IP	4	3	3	4	4	3	3	1	2	3
96	Global Rising TP	Kara IP	4	4	5	4	3	3	3	1	1	3
97	Idea Square	Kara IP	4	3	3	4	4	3	4	1	1	3
98	Takamori Ind	Batamindo, Mukakuning	4	4	3	4	3	4	3	2	3	3
99	Livatech EI	Kara IP	4	4	3	4	3	3	4	1	1	3
100	Meiko Fine B	Kara IP	4	4	3	4	4	3	3	1	1	3
101	Singatec Batam	Kara IP	4	3	3	4	3	3	4	1	2	3
102	Fujistar	Malindo	4	4	3	4	4	3	3	1	2	3
103	Getronic Batam	Malindo	4	3	3	4	3	3	4	1	2	3
104	Leo Industries	Batamindo, Mukakuning	4	3	4	3	4	4	3	1	2	3
105	Maruwa Indonesia	Batamindo, Mukakuning	3	3	3	3	3	4	3	2	3	4
106	Suntec Manf	Citrabuana, Batu Ampar	3	2	4	3	3	3	3	1	2	3
107	NCA Batam	Citrabuana, Batu Ampar	3	2	4	3	3	3	3	1	2	3
108	Kyotronics Batam	Citrabuana, Batu Ampar	3	2	4	3	3	3	3	1	2	2
109	Hantong P Manf	Citrabuana, Batu Ampar	3	2	4	3	3	3	3	1	2	3
110	Besa Engineering	Citrabuana, Batu Ampar	3	2	4	3	3	3	3	1	2	2



**PROGRAM STUDI ILMU MANAGEMENT  
PROGRAM PASCASARJANA  
UNIVERSITAS AIRLANGGA  
2004**

**HANYA DIISI OLEH SURVEYOR SAJA !**  
***TO BE FILLED BY SURVEYOR ONLY !***

No. Kuesioner : .....  
*Questioner no.*

Tanggal/ Date : .....

Surveyor : .....

Keterangan : .....  
*Remark*

**PENGANTAR / INTRODUCTION :**

Para Tenant (Responden) yang terhormat, Daftar Pertanyaan (Kuesioner) ini adalah untuk keperluan penelitian Tugas Akhir (Thesis), untuk itu kami sangat berterima kasih atas kesediaan Bapak / Ibu/ sdr/ sdri untuk dapat berpartisipasi dalam mengisi kuesioner ini.

*Dear valuable tenants (respondent), this questioner is for thesis research requirement, therefore we are most grateful for your kind willingness to participate in filling this questioner.*

**PETUNJUK PENGISIAN / FILLING INSTRUCTION :**

- Jawablah seluruh pertanyaan di bawah ini dengan lengkap dan benar  
*Please give complete and honest answer to all questions.*
- Berilah tanda silang ("X") pada jawaban yang Bapak/ibu/sdr/sdri maksudkan.  
*Please give a cross ("X") mark to your chosen answer.*

**I. PROFIL PERUSAHAAN / COMPANY'S PROFILE**

1. Nama Responden : .....  
*Respondent Name*
2. Jabatan Responden : .....  
*Respondent Designation*
3. Nama Perusahaan : .....  
*Company's Name*
4. Alamat Perusahaan : .....  
*Company's Address*
5. Status Perusahaan : PMA  
*Company's state*
6. Mulai beroperasi di Batam : .....  
*Start operation in Batam*
7. Lokasi Perusahaan : dalam kawasan industri/luar kawasan industri  
(coret yang bukan jawaban)  
*Company's location : inside / outside industrial estate  
(strikethrough the incorrect one)*
8. Jenis produk yang dihasilkan / *Products:*
  - a. Industri manufaktur elektronika (semikonduktor)/  
*electronic manufacturing industry (semiconductors)*
  - b. Industri manufaktur elektronika (computer & peripheral)/  
*electronic manufacturing industry (computers & peripherals)*
  - c. Industri manufaktur elektronika (rumah tangga)/  
*electronic manufacturing industry (home appliances)*

9. Negara asal perusahaan/ *Country of origin* :
  - a. Singapura/ *Singapore*
  - b. Malaysia
  - c. Jepang/ *Japan*
  - d. Asia lainnya, sebutkan :.....  
*Other Asian country, i.e. :*.....
  - e. Eropa/ *Europe*
  - f. Amerika/ *America*
  - g. Australia
  - h. Lainnya, sebutkan :.....  
*Other Country, i.e. :*.....
10. Lama beroperasi di Batam/ *Length of operation in Batam* :
  - a. kurang dari 1 tahun/ *Less than a year*
  - b. 1 tahun s.d. 5 tahun/ *1 year to 5 year*
  - c. diatas 5 tahun/ *above 5 years*

## II. PELAYANAN PUBLIK/ *PUBLIC SERVICES*

### A. KEAMANAN/ *SECURITY*

11. Bagaimana pelayanan bidang keamanan yang diberikan oleh instansi terkait bagi perusahaan saudara didalam melakukan kegiatan usaha di Batam :  
*How is security services provided by related institution for your company as it runs the business in Batam :*
  - a. Sangat baik/ *Very Good*
  - b. Baik/ *Good*
  - c. Biasa/ *Usual*
  - d. Kurang baik/ *Poor*
  - e. Buruk/ *Bad*
12. Selama melakukan kegiatan usaha di Batam, bagaimana kualitas aparat keamanan didalam memberikan pelayanan :  
*When doing your business so far, how do you perceive the quality of the security officers in providing their services :*
  - a. Sangat baik/ *Very Good*
  - b. Baik/ *Good*
  - c. Biasa/ *Usual*
  - d. Kurang baik/ *Poor*
  - e. Buruk/ *Bad*
13. Selama melakukan kegiatan usaha di Batam, bagaimana jumlah aparat keamanan didalam memberikan pelayanan :  
*When doing your business so far, how many is the security force that are providing the services :*
  - a. Sangat memadai/ *More than enough*
  - b. Memadai/ *Adequate*
  - c. Biasa/ *Usual*
  - d. Kurang memadai/ *Insufficient*
  - e. Kurang/ *Very insufficient*

### B. TENAGA KERJA/ *LABORS*

14. Bagaimana pelayanan pengurusan izin perekrutan tenaga kerja yang diberikan oleh instansi terkait bagi perusahaan saudara didalam melakukan kegiatan usaha di Batam :  
*How is the services given for labor recruitment permit application by related institution for your company as it runs the business in Batam :*
  - a. Sangat baik/ *Very Good*
  - b. Baik/ *Good*
  - c. Biasa/ *Usual*
  - d. Kurang baik/ *Poor*
  - e. Buruk/ *Bad*

15. Bagaimana cara memperoleh tenaga kerja bagi perusahaan saudara didalam melakukan kegiatan usaha di Batam :
- How to recruit workers for your company as it runs the business in Batam:*
- Sangat mudah/ *Very Easy*
  - Mudah/ *Easy*
  - Biasa/ *Usual*
  - Susah/ *Difficult*
  - Sangat susah/ *Very Difficult*
16. Bagaimana pelayanan pengurusan perizinan pengadaan tenaga kerja asing yang diberikan oleh Instansi terkait bagi perusahaan saudara didalam melakukan kegiatan usaha di Batam :
- How is the services given for expatriate recruitment permit application by related institution to your company as it runs the business in Batam :*
- Sangat baik/ *Very Good*
  - Baik/ *Good*
  - Biasa/ *Usual*
  - Kurang baik/ *Poor*
  - Buruk/ *Bad*

**C. PERLAKUAN TERHADAP INVESTOR/ *TREATMENT TOWARD INVESTORS***

17. Bagaimana pelayanan perizinan Penanaman Modal Asing (PMA) yang diberikan oleh instansi terkait bagi perusahaan saudara didalam melakukan kegiatan usaha di Batam :
- How is the services given for foreign investors (PMA) permit by related institution to your company as it runs the business in Batam :*
- Sangat baik/ *Very Good*
  - Baik/ *Good*
  - Biasa/ *Usual*
  - Kurang baik/ *Poor*
  - Buruk/ *Bad*

**D. KEMUDAHAN MELAKUKAN USAHA / *EASINESS TO RUN THE BUSINESS***

18. Selama melakukan kegiatan usaha, bagaimana kemudahan memperoleh Informasi dari pemerintah :
- When doing your business so far, how is the easiness to obtain information from the government :*
- Sangat baik/ *Very Good*
  - Baik/ *Good*
  - Biasa/ *Usual*
  - Kurang baik/ *Poor*
  - Buruk/ *Bad*
19. Selama melakukan kegiatan usaha, bagaimana kecepatan pelayanan pemberian izin dari pemerintah :
- When doing your business so far, how is the speed of service in issuing the permit from the government :*
- Sangat baik/ *Very Good*
  - Baik/ *Good*
  - Biasa/ *Usual*
  - Kurang baik/ *Poor*
  - Buruk/ *Bad*

**E. INFRASTRUKTUR FISIK/ *PHYSICAL INFRASTRUCTURE***

20. Selama melakukan kegiatan usaha, bagaimana kondisi umum infrastruktur di Batam :
- When doing your business so far, how do you perceive the general infrastructure condition in Batam :*
- Sangat baik/ *Very Good*
  - Baik/ *Good*
  - Biasa/ *Usual*
  - Kurang baik/ *Poor*
  - Buruk/ *Bad*
21. Selama melakukan kegiatan usaha, bagaimana pelayanan kelistrikan di Batam :
- When doing your business so far, how is the electricity services in Batam Batam :*
- Sangat baik/ *Very Good*
  - Baik/ *Good*
  - Biasa/ *Usual*
  - Kurang baik/ *Poor*
  - Buruk/ *Bad*
22. Selama melakukan kegiatan usaha, bagaimana pelayanan telekomunikasi (telepon, telepon selular, fax) di Batam :
- When doing your business so far, how is the telecommunication services (telephone, cellular phone, fax) in Batam :*
- Sangat baik/ *Very Good*
  - Baik/ *Good*
  - Biasa/ *Usual*
  - Kurang baik/ *Poor*
  - Buruk/ *Bad*
23. Selama melakukan kegiatan usaha, bagaimana pelayanan Informasi Teknologi (IT) di Batam :
- When doing your business so far, how is the information technology (IT) services in Batam :*
- Sangat baik/ *Very Good*
  - Baik/ *Good*
  - Biasa/ *Usual*
  - Kurang baik/ *Poor*
  - Buruk/ *Bad*
24. Selama melakukan kegiatan usaha, bagaimana pelayanan air bersih di Batam :
- When doing your business so far, how is the clean water services in Batam:*
- Sangat baik/ *Very Good*
  - Baik/ *Good*
  - Biasa/ *Usual*
  - Kurang baik/ *Poor*
  - Buruk/ *Bad*
25. Selama melakukan kegiatan usaha, bagaimana kondisi jalan dan system transportasi di Batam :
- When doing your business so far, how are the road condition and transportation system in Batam :*
- Sangat baik/ *Very Good*
  - Baik/ *Good*
  - Biasa/ *Usual*
  - Kurang baik/ *Poor*
  - Buruk/ *Bad*

26. Selama melakukan kegiatan usaha, bagaimana pelayanan kepelabuhanan di Batam :
- When doing your business so far, how is the seaport services in Batam :*
- Sangat baik/ *Very Good*
  - Baik/ *Good*
  - Biasa/ *Usual*
  - Kurang baik/ *Poor*
  - Buruk/ *Bad*
27. Selama melakukan kegiatan usaha, bagaimana pelayanan bandara di Batam :
- When doing your business so far, how is the airport services in Batam :*
- Sangat baik/ *Very Good*
  - Baik/ *Good*
  - Biasa/ *Usual*
  - Kurang baik/ *Poor*
  - Buruk/ *Bad*
28. Selama melakukan kegiatan usaha, bagaimana kondisi saluran drainase di Batam :
- When doing your business so far, how is the drainage condition in Batam :*
- Sangat baik/ *Very Good*
  - Baik/ *Good*
  - Biasa/ *Usual*
  - Kurang baik/ *Poor*
  - Buruk/ *Bad*
29. Selama melakukan kegiatan usaha, bagaimana pelayanan pengelolaan limbah industri di Batam :
- When doing your business so far, how is the industrial waste management in Batam :*
- Sangat baik/ *Very Good*
  - Baik/ *Good*
  - Biasa/ *Usual*
  - Kurang baik/ *Poor*
  - Buruk/ *Bad*
30. Selama melakukan kegiatan usaha, bagaimana pelayanan pengelolaan limbah rumah tangga di Batam :
- When doing your business so far, how is the household waste management in Batam :*
- Sangat baik/ *Very Good*
  - Baik/ *Good*
  - Biasa/ *Usual*
  - Kurang baik/ *Poor*
  - Buruk/ *Bad*

**F. KUALITAS KEHIDUPAN WNA/ FOREIGNER'S LIFE QUALITY**

31. Selama melakukan kegiatan usaha, bagaimana penyediaan sarana umum bagi WNA yang tinggal di Batam :
- When doing your business so far, how is the public infrastructure facility for foreigners living in Batam :*
- Sangat baik/ *Very Good*
  - Baik/ *Good*
  - Biasa/ *Usual*
  - Kurang baik/ *Poor*
  - Buruk/ *Bad*

32. Selama melakukan kegiatan usaha, bagaimana penyediaan keamanan bagi WNA yang tinggal di Batam :  
*When doing your business so far, how is security services for foreigners living in Batam :*
- Sangat baik/ *Very Good*
  - Baik/ *Good*
  - Biasa/ *Usual*
  - Kurang baik/ *Poor*
  - Buruk/ *Bad*
33. Selama melakukan kegiatan usaha, bagaimana penyediaan sarana perumahan bagi WNA yang tinggal di Batam :  
*When doing your business so far, how is the housing facility for foreigners living in Batam :*
- Sangat baik/ *Very Good*
  - Baik/ *Good*
  - Biasa/ *Usual*
  - Kurang baik/ *Poor*
  - Buruk/ *Bad*
34. Selama melakukan kegiatan usaha, bagaimana kondisi dan penyediaan sarana dan prasarana transportasi bagi WNA yang tinggal di Batam :  
*When doing your business so far, how is the condition and the availability of transportation Infrastructure for foreigners living in Batam :*
- Sangat baik/ *Very Good*
  - Baik/ *Good*
  - Biasa/ *Usual*
  - Kurang baik/ *Poor*
  - Buruk/ *Bad*
35. Selama melakukan kegiatan usaha, bagaimana penyediaan fasilitas kesehatan bagi WNA yang tinggal di Batam :  
*When doing your business so far, how is the health facility and availability for foreigners living in Batam :*
- Sangat baik/ *Very Good*
  - Baik/ *Good*
  - Biasa/ *Usual*
  - Kurang baik/ *Poor*
  - Buruk/ *Bad*
36. Selama melakukan kegiatan usaha, bagaimana penyediaan fasilitas perbelanjaan bagi WNA yang tinggal di Batam :  
*When doing your business so far, how is the shopping facility & market availability for foreigners living in Batam :*
- Sangat baik/ *Very Good*
  - Baik/ *Good*
  - Biasa/ *Usual*
  - Kurang baik/ *Poor*
  - Buruk/ *Bad*
37. Selama melakukan kegiatan usaha, bagaimana penyediaan fasilitas pendidikan bagi WNA (keluarga/anak) yang tinggal di Batam :  
*When doing your business so far, how is the education facility for foreigners (family and/or children) living in Batam :*
- Sangat baik/ *Very Good*
  - Baik/ *Good*
  - Biasa/ *Usual*
  - Kurang baik/ *Poor*
  - Buruk/ *Bad*

**G. LINGKUNGAN SOSIAL DOMESTIK/ SOCIAL DOMESTIC ENVIRONMENT**

38. Selama melakukan kegiatan usaha, bagaimana kondisi social masyarakat di Batam didalam menerima pendatang / warga Negara asing :  
*When doing your business so far, how is the society's social condition in Batam in welcoming outsiders / foreign citizens :*
- Sangat baik/ *Very Good*
  - Baik/ *Good*
  - Biasa/ *Usual*
  - Kurang baik/ *Poor*
  - Buruk/ *Bad*
39. Selama melakukan kegiatan usaha, bagaimana kondisi politik masyarakat lokal dalam menunjang investasi :  
*When doing your business so far, how is the society's political condition in supporting (foreign) investment :*
- Sangat baik/ *Very Good*
  - Baik/ *Good*
  - Biasa/ *Usual*
  - Kurang baik/ *Poor*
  - Buruk/ *Bad*

**H. SUMBER DAYA ALAM/ NATURAL RESOURCES**

40. Selama melakukan kegiatan usaha, bagaimana kondisi lingkungan secara umum di Batam :  
*When doing your business so far, how is the environmental condition in general in Batam :*
- Sangat baik/ *Very Good*
  - Baik/ *Good*
  - Biasa/ *Usual*
  - Kurang baik/ *Poor*
  - Buruk/ *Bad*
41. Selama melakukan kegiatan usaha, bagaimana kemudahan untuk mendapatkan bahan baku lokal guna menunjang proses produksi perusahaan anda :  
*When doing your business so far, how is the accessibility to get local raw materials to support the production process in your company :*
- Sangat baik/ *Very Good*
  - Baik/ *Good*
  - Biasa/ *Usual*
  - Kurang baik/ *Poor*
  - Buruk/ *Bad*
42. Selama melakukan proses produksi, bagaimana harga bahan baku yang diperoleh baik secara lokal maupun import :  
*When doing the production process so far, how is the prices of both local and imported raw materials :*
- Sangat kompetitif/ *Very Competitive*
  - Kompetitif/ *Competitive*
  - Biasa/ *Usual*
  - Kurang kompetitif/ *Less Competitive*
  - Mahal/ *Expensive*